



ANAK TERLINDUNGI PEREMPUAN BERDAYA

# PROFIL GENDER DAN ANAK

TAHUN 2025



KABUPATEN BANGKA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mendukung pembangunan yang responsif gender dan ramah anak, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Profil Gender dan Anak disusun sebagai instrumen penting untuk memberikan gambaran kondisi aktual terkait kesetaraan gender, peran serta perempuan dalam pembangunan, pemenuhan hak-hak anak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Data dan informasi yang dihimpun dalam profil ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang lebih inklusif, adil, serta berkeadilan sosial.

Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2025 melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, lembaga vertikal, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan yang telah memberikan kontribusi berupa data, masukan, serta dukungan dalam penyempurnaan dokumen ini. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Harapan kami, profil ini tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi juga menjadi rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bangka yang berpihak pada perempuan dan anak. Dengan demikian, cita-cita Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju dapat terwujud, khususnya di Kabupaten Bangka.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita mewujudkan pembangunan

yang responsif gender dan layak anak demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka.

Mengetahui,  
Plt. Kepala DP2KBP3A  
Kabupaten Bangka

Lia Anggraini,SKM.M.Kes.

# BAB I



**DP2KBP3A**  
Kabupaten Bangka

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka. Dokumen ini memuat data dan statistik terkait isu gender dan anak di wilayah tersebut.

Salah satu indikator penting yang dibahas adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,490, mengalami penurunan 0,007 poin dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender di beberapa kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Selain itu, dokumen ini juga mencakup data kependudukan, seperti jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang dapat diakses melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka.

Informasi lebih lanjut mengenai Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat ditemukan di situs resmi Pemerintah Kabupaten Bangka. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bangka dalam setiap sektor kehidupan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan pada setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan anak. Namun disadari bahwa hasil pembangunan itu belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan aspirasi tidak optimal dan terakomodir oleh perencanaan dan pembuat keputusan pembangunan yang pada umumnya laki-laki.

## **B. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum yang mendukung kegiatan penyusunan profil gender dan anak Kabupaten Bangka diantaranya :

1. UUD 1945 pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. UUD 1945 Pasal 28 c ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
3. UUD 1945 Pasal 28 b ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
5. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi manusia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 ditambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
7. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
8. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak No.6 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud.**

Maksud dari penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang saya buat adalah untuk memberikan kerangka kerja yang benar terstruktur, terperinci, dan kredibel mengenai tujuan dan latar belakang dokumen tersebut.

Secara sederhana, maksud utama dokumen ini adalah:

- a. Sebagai Alat Perencanaan: Dokumen ini berfungsi sebagai basis data dan analisis utama bagi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk merencanakan program dan anggaran yang adil bagi perempuan dan laki-laki (Responsif Gender) serta memenuhi hak-hak anak (Berperspektif Hak Anak) pada tahun 2025.
- b. Untuk Mengetahui Kesenjangan: Menganalisis sejauh mana perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan, laki-laki, dan anak-anak, sehingga kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran.

- c. Mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA): Memastikan semua program pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian status Kabupaten Bangka sebagai Kabupaten Layak Anak.
- d. Struktur yang saya buat mencerminkan bagaimana dokumen resmi pemerintah disusun, yaitu selalu diawali dengan Latar Belakang (mengapa dokumen ini penting dan dasar hukumnya apa) dan Tujuan (apa yang ingin dicapai melalui dokumen ini).

## **2. Tujuan**

### **a. Umum**

Terwujudnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah yang responsif gender dan berperspektif hak anak di Kabupaten Bangka, sehingga dapat mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan status Kabupaten Layak Anak (KLA).

### **b. Tujuan Khusus:**

- 1) Menyediakan Data Dasar: Menyajikan data terpilah gender dan anak yang komprehensif dan up-to-date sebagai sumber rujukan tunggal (basis data) bagi seluruh OPD di Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan mengukur capaian kinerja.
- 2) Mengidentifikasi Kesenjangan: Menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi ideal dengan kondisi aktual yang dialami perempuan dan laki-laki, serta anak laki-laki dan anak perempuan, di berbagai sektor pembangunan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, dan perlindungan).
- 3) Mendukung Perumusan Kebijakan: Menjadi dasar ilmiah dan bukti (evidence-based) dalam perumusan kebijakan,

strategi, dan program kerja yang secara spesifik memitigasi masalah gender dan anak serta memenuhi hak-hak anak.

- 4) Mendorong Anggaran Responsif Gender (ARG): Memfasilitasi proses Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk memastikan alokasi anggaran daerah yang proporsional dan efektif dalam mengatasi isu-isu gender dan anak.
- 5) Meningkatkan Kualitas KLA: Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan meningkatkan indikator pemenuhan hak anak di 5 klaster KLA (Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan Perlindungan Khusus).

#### **D. Sumber Data**

Data dan informasi yang disajikan dalam Profil Gender Tahun 2025 ini dihimpun dari berbagai sumber yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Data yang di sajikan adalah data Tahun 2025.

#### **E. Sistematika Penyajian**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan

Tujuan, Sumber Data, dan diakhir bab ini ditutup dengan sistematika penyajian Profil Gender dan Anak

##### **BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH**

- Memuat tentang Keadaan geografis daerah, Batas wilayah, Gambaran luas wilayah Kabupaten Bangka, Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka, Sosial budaya, Potensi Unggulan atau Sumber Daya Daerah.
- BAB II PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER**  
Memuat tentang Konsep gender, Pembangunan berspektif gender
- BAB IV GAMBARAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BANGKA**  
Memuat tentang IPM, IPG, IDG di Kabupaten Bangka.
- BAB V KEPENDUDUKAN**  
Memuat tentang Jumlah dan persebaran penduduk, Penduduk berdasarkan kelompok umur, Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial, Kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) Kepemilikan kartu keluarga (KK), Kepala keluarga perempuan.
- BAB VI GENDER BIDANG PENDIDIKAN**  
Memuat tentang Sarana dan prasarana sekolah, Angka partisipasi kasar (APK), Angka partisipasi murni (APM), Angka partisipasi sekolah (APS), Angka melek huruf, Rata-rata lama sekolah, Pendidikan tinggi yang ditamatkan, Angka putus sekolah (APTS), Angka kelulusan paket A, B dan C.
- BAB VII GENDER BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL**  
Memuat tentang Ekonomi, Sosial.
- BAB VIII GENDER BIDANG KESEHATAN**

Memuat tentang sarana dan prasarana kesehatan, Angka harapan hidup (AHH), Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Kunjungan/pelayanan kesehatan ibu hamil (K1/K4), Angka kematian ibu (AKI), Penyebab kematian ibu (AKI), Pemberian tablet zat besi (Fe) pada ibu hamil, Partisipasi ber KB, Usia perkawinan pertama, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Penderita HIV/AIDS, Kualitas Keluarga.

**BAB IX**      **POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN**

Memuat tentang Keterwakilan perempuan pada bidang legislatif, Peran dan komposisi perempuan di lembaga eksekutif, Peran dan partisipasi perempuan di lembaga yudikatif.

**BAB X**      **GAMBARAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN BANGKA**

Memuat tentang Kondisi kesejahteraan anak, Kepemilikan akta kelahiran untuk anak, Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kesehatan anak.

**BAB XI**      **Gambaran Kasus Dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak**

Memuat tentang Gambaran Kasus Dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

**BAB XII**      **Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**

Memuat tentang Anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus (ABK), Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

**BAB XIII** Penutup

Memuat kesimpulan dan saran.

# BAB II



**DP2KBP3A**  
Kabupaten Bangka

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH**

#### **A. Keadaan geografis daerah.**

Secara astronomis Kabupaten Bangka terletak pada 105' sampai 106' bujur timur dan 1' sampai 2' lintang selatan. Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang Km<sup>2</sup> atau 301.685 Ha atau 3.016,85 Km<sup>2</sup>. Berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keadaan tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH dibawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti pasir kwarsa, kaolin, batu gunung, dll.

**Gambar Peta Kabupaten Bangka**



Kabupaten Bangka beriklim Tropis Type A dengan jumlah curah hujan 2.508,5 per tahun dengan jumlah hari hujan 206 hari. Suhu udara rata-rata Kabupaten Bangka berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang 26,97°C bervariasi diantara 20,8°C hingga 35,00°C

dengan temperatur udara paling tinggi suhu udara maksimum 35°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 39% hingga 100%, sementara intensitas penyinaran matahari berkisar antara 41,52% dan tekanan udara rata-rata berkisaran antara 999,9mb hingga 1.011,2mb.

Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bangka antara lain adalah : Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain. Sungai – sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut yang disebut kolong.

## **B. Batas wilayah**

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.

Secara astronomis terletak antara 10° 20' LU 30° LS dan 105°-106°Bt. Memiliki luas daratan 11.524,14 Km<sup>2</sup>. Berada pada jalur internasional yang menghubungkan dua samudra dan dua benua, merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk berdirinya kawasan industri maritim. Bangka dibatasi oleh laut dan selat sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
Batas Wilayah Kabupaten Bangka

Batas	
Di sebelah Utara	Laut Natuna
Di sebelah Selatan	Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah
Di sebelah Barat	Kab. Bangka Barat, SelatBangka, dan Teluk Kelabat
Di sebelah Timur	Laut Natuna

Jarak yang paling jauh dari ibu kota Kabupaten Bangka ke Ibukota Kabupaten lain adalah Toboali (Kabupaten Bangka Selatan) kemudian Mentok (Kabupaten Bangka Barat).

**Tabel 2.2**  
Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) Ke  
Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi  
(Pangkalpinang)

No	Dari Sungailiat ke Ibukota Kabupaten /Kota di Pulau Bangka	Jarak (Km)
1	Toboali	158
2	Mentok	140
3	Koba	90
4	Pangkalpinang	33

*Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2025*

Jumlah Kecamatan ada 8 (Delapan) Kecamatan di Kabupaten Bangka yang terdiri dari :

1. Kecamatan Sungailiat Ibukota Kecamatan Sungailiat.
2. Kecamatan Pemali Ibukota Kecamatan Pemali.
3. Kecamatan Merawang Ibukota Kecamatan Baturusa.
4. Kecamatan Mendo Barat Ibukota Kecamatan Petaling.
5. Kecamatan Puding Besar Ibukota Kecamatan Puding Besar.
6. Kecamatan Bakam Ibukota Kecamatan Bakam.
7. Kecamatan Riau silip Ibukota Kecamatan Riau Silip.
8. Kecamatan Belinyu Ibukota Kecamatan Belinyu

#### **D. Gambaran luas wilayah kabupaten Bangka.**

Kabupaten Bangka yang luasnya 3.016,85 Km<sup>2</sup> yang tersebar di 8 Kecamatan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mendo Barat, Riau Silip dan Belinyu. Kecamatan Mendo Barat ibukota Kabupaten yang luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Luasnya suatu wilayah dan ketersediaan SDA akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat karena akan menjadi wilayah yang diminati untuk kegiatan ekonomi. Karena itu luas wilayah sangat potensi dalam mempercepat perkembangan. Bila luas wilayah didukung oleh keragaman sumberdaya alam (hayati), seperti pertanian, peternakan dan perikanan serta pertambangan, maka proses pembangunan akan menyentuh relasi gender. Kehidupan sosial dan ekonomi sangat tergantung pada tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

**Tabel 2.3**  
**Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024**

NO	Kecamatan	Uraian	
		Luas Area (km <sup>2</sup> )	Luas Area (%)
1.	Sungailiat	147,05	4,87
2.	Pemali	140,46	4,66
3.	Belinyu	503,54	16,69
4.	Riau Silip	625,91	20,75
5.	Bakam	426,26	14,13
6.	Puding Besar	272,10	9,02
7.	Merawang	215,89	7,16
8.	Mendo Barat	685,64	22,73
	<b>Jumlah</b>	<b>3.016,85</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023*

**Grafik 2.1**  
**Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024**



## **E. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka**

### **1. VISI : Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia)**

Sejahtera : Kondisi Masyarakat yang terpenuhi ketahanan materil dan spiritual yang ditunjukan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi. Meratanya tingkat pendapatan masyarakat, keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah.

Mulia : Kondisi masyarakat memiliki harkat dan martabat serta kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena keberhasilan dalam pencapaian pembangunan dan kesejahteraan sosial yang ideal. Masyarakat yang mulia memiliki kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban yang bermanfaat dan unggul dalam menjadi manusia yang sehat, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif dan mandiri.

### **2. MISI :**

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- d. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
- e. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## F. Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Bangka terdiri dari beragam suku, agama dan etnis masyarakatnya bersifat heterogen. Suku bangsa yang terdapat di Kabupaten Bangka ini diantaranya yaitu suku bugis, suku batak, suku jawa, suku minang, cina, ambon, dll. Etnis cina menjadi mayoritas di Kabupaten Bangka ini dengan populasi angka mendekati 40 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bangka. Semangat dan kegiatan gotong royong masih terpelihara dan berkembang dengan baik disini. Dengan semboyan “**Sepintu Sedulang**” yang bermakna segi sosial masyarakat Bangka didasari oleh semangat gotong royong. Dari aspek agama, Masyarakat Kabupaten Bangka mayoritas Islam dengan komposisi mencapai 87,03%. Selebihnya agama Budha, Kristen, Katolik, Hindu Khonghucu, kepercayaan. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Jumlah Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama  
di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO		KABUPATEN/KOTA : 19.01 BANGKA								
		PENDUDUK					KRISTEN			
	KECAMA TAN	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	JUML AH	PERSE N (%)	LAKI- LAKI	PERE MPUA N	JUM LAH	PERSE N (%)	
1	Sungailiat	38,752	37,256	76,008	22.50	2,061	2,119	4,18	01.24	
2	Belinyu	21,079	20,203	41,282	12.22	686	714	1,4	00.41	
3	Merawang	13,856	13,012	26,868	0,35763 9	306	324	630	00.19	
4	Mendo Barat	27,015	24,939	51,954	15.38	109	103	212	00.06	
5	Pemali	16,187	15,463	31,65	09.37	464	463	927	00.27	
6	Bakam	9,882	9,036	18,918	0,25	44	47	91	00.03	

7	Riau Silip	13,819	12,81	26,629	0,35277 8	260	259	519	00.15
8	Puding Besar	10,755	9,884	20,639	06.11	7	7	14	00.00
<b>JUMLAH ...</b>		<b>151,345</b>	<b>142,603</b>	<b>293,94 8</b>	<b>87.03.0 0</b>	<b>3,937</b>	<b>4,036</b>	<b>7,97 3</b>	<b>02.36</b>

KABUPATEN/KOTA : 19.01 BANGKA									
NO	KECAMA TAN	PENDUDUK							
		HINDU				BUDHA			
		LAKI- LAKI	PEREM PUAN	JUML AH	PERS EN (%)	LAKI- LAKI	PERE MPUA N	JUMLA H	PERSE N (%)
1	Sungailiat	12	9	21	00.01	5,198	5,212	10,41	03.08
2	Belinyu	6	3	9	00.00	3,494	3,293	6,787	02.01
3	Merawang	0	0	0	00.00	962	973	1,935	00.57
4	Mendo Barat	1	3	4	00.00	70	53	123	00.04
5	Pemali	3	3	6	00.00	917	926	1,843	00.55
6	Bakam	0	0	0	00.00	139	138	277	00.08
7	Riau Silip	1	1	2	00.00	846	779	1,625	00.48
8	Puding Besar	0	0	0	00.00	4	1	5	00.00
<b>JUMLAH ...</b>		<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>00.01</b>	<b>11,63</b>	<b>11,375</b>	<b>23,005</b>	<b>0,30625</b>

KABUPATEN/KOTA : 19.01 BANGKA									
NO	KECAMA TAN	PENDUDUK							
		KHONGHUCU				KATHOLIK			
		LAKI- LAKI	PEREM PUAN	JUML AH	PERS EN (%)	LAKI- LAKI	PERE MPUA N	JUMLA H	PERSE N (%)
1	Sungailiat	1,985	2,005	3,99	01.18	732	760	1,492	00.44
2	Belinyu	545	517	1,062	00.31	355	391	746	00.22
3	Merawang	825	796	1,621	00.48	199	218	417	00.12
4	Mendo Barat	31	36	67	00.02	98	97	195	00.06
5	Pemali	560	549	1,109	00.33	160	169	329	00.10

6	Bakam	58	61	119	00.04	2	7	9	00.00
7	Riau Silip	216	236	452	00.13	209	215	424	00.13
8	Puding Besar	0	0	0	00.00	0	1	1	00.00
<b>JUMLAH ...</b>		<b>4,22</b>	<b>4,2</b>	<b>8,42</b>	<b>02.49</b>	<b>1,755</b>	<b>1,858</b>	<b>3,613</b>	<b>01.07</b>

KABUPATEN/KOTA : 19.01 BANGKA							
NO	KECAMATAN	PENDUDUK				PERSENTASE (%)	
		KEPERCAYAAN					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN (%)		
1	Sungailiat	128	140	268	00.08		
2	Belinyu	98	83	181	00.05		
3	Merawang	68	71	139	00.04		
4	Mendo Barat	7	6	13	00.00		
5	Pemali	47	35	82	00.02		
6	Bakam	9	9	18	00.01		
7	Riau Silip	27	26	53	00.02		
8	Puding Besar	0	0	0	00.00		
<b>JUMLAH ...</b>		<b>384</b>	<b>370</b>	<b>754</b>	<b>00.22</b>		

## **G. Potensi Unggulan/ Sumber Daya Daerah.**

Kabupaten Bangka dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak potensi unggulan atau sumber daya untuk dikembangkan seperti bidang Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Industri dan Pertambangan serta perdagangan. Hal inilah yang mendorong pesatnya perkembangan aktivitas masyarakat baik dari aspek sosial budaya dan ekonomi.

**Tabel 2.5**

Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka  
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sungailiat	4.024
2	Mendo Barat	442
3	Merawang	419
4	Pemali	168
5	Bakam	29
6	Puding Besar	146
7	Riau Silip	424
8	Belinyu	1.171
KESELURUHAN		6.831

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024*

Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Bangka 6.831 dan yang terbanyak bedomisili di Sungailiat sebanyak 4.024 orang, disusul Belinyu 1.171 Jumlah kapal 2.747, dengan perahu 169 dan perahu dengan motor tempel 1.564 dan kapal motor 1.014.

Di Kabupaten Bangka petani tradisional umumnya menanam lada dan karet. Sementara perusahaan dan petani plasma menggarap perkebunan sawit. Daerah lainnya terkenal dengan produk nanas. Perkebunan di Kabupaten di bagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Produksi

komoditas perkebunan rakyat terdiri dari antar lain lada, karet, kelapa dan coklat. Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh 12 perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang ditunjuk menjadi hutan tetap. Berdasarkan undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan kawasan hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi hutan lindung dan hutan produksi. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok.

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan yang termasuk ke dalam kawasan lindung antara lain HL Pejem, HL Bubus II, HL Bubus, HL Sungailiat Mapur, dan HL Kotawaringin. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Hutan Konservasi terdiri dari : Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM), kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN) Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru (TB). Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata

berburu.

Selain perkebunan perikanan tangkap di Bangka juga berpotensi besar untuk dikembangkan. Kabupaten Bangka merupakan daerah kepulauan dan pesisir yang sangat strategis dengan batas wilayah yang berdampingan dengan laut Natuna, selat Karimata, laut Jawa dan selat Bangka. Dengan posisi seperti ini wilayah perairan Kabupaten Bangka memiliki berbagai potensi sumber daya kelautan yang luar biasa. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kabupaten Bangka juga memiliki perairan payau, rawa, sungai dan kolong (eks galian timah), yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan prospektif bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Potensi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bangka juga berpotensi untuk pengembangan budidaya laut antara lain untuk komoditas kakap, kerapu, dan rumput laut. Perairan laut Kabupaten Bangka juga menyimpan potensi non ikan yaitu untuk pengembangan wisata bahari dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan penambangan lepas pantai. Pengamanan ketahanan pangan juga dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air laut, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing komoditi produk perikanan.

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat pulau Bangka

dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Komoditi yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti ikan Kerapu, Kakap Merah, Udang, Cumi cumi, Sirip Ikan dan lain-lain. Volume dan nilai tangkapan ikan tahun 2022 yaitu 28.055,24 ton dan jumlah produksi 1.123.185.500,00 (ribu) rupiah nilai tangkapan. Dan untuk tangkapan ikan tertinggi adalah ikan laut sejumlah 28.002,70 ton dengan produksi 1.120.908.400,00 ribu rupiah. Jumlah produksi dan nilai budidaya ikan sebesar 338.593 kg dan nilainya 7.746.751.000 (ribu) rupiah nilai budidaya ikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor perikanan dengan jumlah rumah tangga yang melakukan perikanan tangkap 2.977, rumah tangga budidaya 351 dan rumah tangga pengolah ikan 225.

#### **H. Lahan dan Kehutanan**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Pembangunan pada sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memeratakan pembangunan dipedesaan. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah ke arah itu menerapkan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

**Tabel 2.6**

Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanam di Kabupaten Bangka (ton) Tahun 2024

NO.	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (Ton)	KETRANGAN (WUJUD PRODUKSI)
	<b>TANAMAN TAHUNAN (Perennial Crops)</b>		
1	2	3	4
1	Karet (Rubber)	26.548,63	Slab Basah
2	Kelapa (Coconut)	5.535,24	Kopra
3	Kelapa Sawit (Oil Plan)	100.123,82	CPO
4	Kopi (Coffe)	43,14	Biji Kering
5	Kakao (Cocoa)	526,90	Biji Kering
6	Teh (Tea)	-	
7	Jambu Mete (Cashew Nut)	-	
8	Pala (Nutmeg)	-	
9	Lada (Pepper)	2.545,31	Biji Kering
	<b>Tanaman Semusim (Seasonal Crop)</b>		
1	Tebu (Sugar Cane)	-	
2	Tembakau (Tobacco)	-	
3	Nilam (Patchouli)	-	

## I. Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB).

Indonesia. Potensi ekonomi di Wilayah Kabupaten Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam publikasi ini adalah sektor pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air. Perkembangan ekonomi di wilayah ini masih

mengandalkan pada eksplorasi sumber daya alam (SDA). Hal ini tergambar pada sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor unggulan. Kabupaten Bangka merupakan daerah yang potensial di sektor pertambangan karena mengandung biji timah beserta mineral ikutannya dan mineral bukan logam yang tersebar secara merata antara lain pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain.

Pertambangan timah merupakan sektor yang mendominasi perekonomian dan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di kabupaten Bangka. Informasi terkini mengenai potensi sumber daya mineral bersumber pada data pusat sumber daya geologi menunjukkan bahwa tonase sumber daya mineral timah masih cukup besar. Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu lapangan usaha yang perannanya cukup besar bagi perekonomian, mengingat komoditi timah yang masih menjadi ciri khas Provinsi kepulauan Bangka Belitung .

**Tabel 2.7**

Jumlah Produksi Biji Timah Menurut Kecamatan di Kabupaten  
Bangka Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sungailiat	2.881
2	Mendo Barat	3
3	Merawang	161
4	Pemali	328
5	Bakam	4
6	Puding Besar	0
7	Riau Silip	116
8	Belinyu	0

*Sumber : Bangka Dalam Angka Tahun 2024*

Produksi Biji Timah pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 produksi biji timah mencapai 7.114 ton, menurun di tahun 2022 menjadi 4.300 ton. Pada tahun 2022 produksi biji timah terbesar berada di Sungailiat 2.881 ton.

### J. Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan sektor industri berusaha menciptakan struktur ekonomi yang bertumpu pada industri maju dengan didukung sektor pertanian yang tangguh serta berusaha meningkatkan perkembangan industri kecil padat karya (termasuk industri kerajinan rumah tangga) guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha sambil menciptakan nilai tambah dan berpartisipasi dalam mengurangi angka kemiskinan. Untuk pembangunan di sektor industri ditingkatkan dan diarahkan agar semakin menjadi

**Tabel 2.8**

Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Besar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Sungailiat	4	279	401.987.550.000,00
2	Mendo Barat	1	143	377.216.070.000,00
3	Merawang	4	194	167.907.551.000,00
4	Pemali	0	0	-
5	Bakam	5	208	1.952.139.374.000,00

6	Puding Besar	2	100	229.340.000.000,00
7	Riau Silip	2	6	62.855.519.000,00
8	Belinyu	1	526	151.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>1456</b>	<b>3.342.446.064.000,00</b>

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2024

**Tabel 2.9**

Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Besar  
Menurut Jenis Industri di Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Pangan	12	1015	Rp. 2.831.594.706.000,00
2	Kimia dan Bangunan	3	80	Rp. 124.707.551.000,00
3	Logam dan Elektronika	4	361	Rp. 386.143.807.000,00
4	Sandang	0	0	Rp -
5	Kerajinan	0	0	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>1456</b>	<b>Rp. 3.342.446.064.000,00</b>

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2023

**Tabel 2.10**

Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri  
Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Sungailiat	1	119	Rp 8.200.000,00
2	Mendo Barat	21	803	Rp 90.354.389,00

3	Merawang	9	458	Rp 71.350.353,00
4	Pemali	2	166	Rp 18.031.305,00
5	Bakam	0	0	-
6	Puding Besar	3	21	Rp 18.275.000,00
7	Riau Silip	4	207	Rp 12.675.000,00
8	Belinyu	3	280	Rp 21.732.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>2.054</b>	<b>Rp 240.618.047,00</b>

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2023

**Tabel 2.11**

Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Menengah Menurut Jenis Industri di Kabupaten Bangka Tahun

2024

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Pangan	6	186	Rp 30.850.499,00
2	Kimia dan Bangunan	11	714	Rp 71.226.058,00
3	Logam dan Elektronika	26	1154	Rp 138.541.490,00
4	Sandang	0	0	-
5	Kerajinan	0	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>2054</b>	<b>Rp 240.618.047,00</b>

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2023

**Tabel 2.12**

Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Kecil  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Sungailiat	1434	4208	Rp 38.541.448,00
2	Mendo Barat	554	902	Rp 8.391.200,00
3	Merawang	487	1405	Rp 17.557.242,00
4	Pemali	518	1133	Rp 11.528.100,00
5	Bakam	240	371	Rp 2.712.800,00
6	Puding Besar	223	383	Rp 2.385.900,00
7	Riau Silip	313	582	Rp 3.734.680,00
8	Belinyu	649	1449	Rp 10.778.385,00
<b>Jumlah</b>		<b>4418</b>	<b>10433</b>	<b>Rp 95.629.755,00</b>

*Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2023*

**Tabel 2.13**

Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Kecil  
Menurut Jenis Industri di Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Pangan	2484	4899	4 899 28 308 492 000
2	Kimia dan Bangunan	442	2187	25 402 550 000
3	Logam dan Elektronika	401	1076	34 441 798 528
4	Sandang	139	190	1 408 800 000
5	Kerajinan	327	473	800 100 000
<b>Jumlah</b>		<b>3793</b>	<b>8825</b>	<b>90 361 540 528</b>

*Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2023*

Di Kabupaten Bangka ada 3.860 industri, yang terdiri dari industri besar sebanyak 19 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.456 orang. Industri sedang sebanyak 48 perusahaan dengan tenaga kerja 2.508 orang sedangkan industri kecil rumah tangga sebanyak 3.793 unit perusahaan dengan 8.825 orang tenaga kerja.

## I. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu unggulan yang menjadi leading sektor pembangunan di Kabupaten Bangka. Hal ini didiperkuat pemerintah daerah dengan menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan bedasarkan potensi yang ada. Hal ini menunjukan bahwa kepariwisataan telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat ini pembangunan kepariwisataan lebih difokuskan pada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.

Saat ini potensi wisata yang memiliki daya tarik cukup tinggi di Kabupaten Bangka adalah wisata bahari. Selain dikarenakan kondisi geografis dengan garis pantai sepanjang 1295,83 km dan karakteristik pasir pantai yang putih namun terdapat juga pemandangan yang indah lainnya seperti bebatuan granit. Sementara itu meskipun Bangka sangat terkenal akan potensi wisata baharinya namun terdapat juga beragam potensi lainnya sangat potensial untuk dikembangkan seperti keanekaragaman hayati flora (meranti, ramin,Mandau,bulin,krengas, kapuk, jelutung dan lain-lain) serta fauna (rusa, beruk, monyet, trenggiling,

musang,tarsius bancanius, dan lain-lain) yang merupakan potensi yang ada di Bangka Belitung.

Alasan dikembangkannya pariwisata di Kabupaten Bangka karena Bangka merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi perairan laut sebagai sumber hasil laut dan sebagai daerah pariwisata pantai. Hal ini ditunjang oleh lintasan perhubungan laut, udara yang potensial dan ekonomis. Kabupaten Bangka merupakan potensi wisata yang cukup menarik seperti pantai, air panas, peninggalan sejarah, batu belubang, kuliner dan gunung/perbukitan. Perkembangan pariwisata tak lepas dari bisnis jasa penginapan dan akomodasi, serta kuliner. Di Kabupaten Bangka terdapat 297 rumah makan/restoran pada tahun 2022 yang merupakan tempat makan bagi masyarakat maupun pengunjung. Jumlah okomodasi penginapan baik bintang dan non bintang di Kabupaten Bangka terdapat 24 jasa penginapan.

**Tabel 2.14**

Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Kecamatan	2023
1	Sungailiat	167
2	Mendo Barat	17
3	Merawang	6
4	Pemali	30
5	Bakam	1
6	Puding Besar	6
7	Riau Silip	13
8	Belinyu	57
<b>Jumlah</b>		<b>297</b>

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka*

*Tahun 2023*

Di Kabupaten Bangka pada tahun 2023 jumlah rumah makan/restoran terdapat 297, tahun 2020 sebanyak 255, dan tahun 2021 sebanyak 54. Apabila dibandingkan ditahun 2020 dan 2021 pada tahun 2022 terdapat peningkatan. Dan yang terbanyak berada di Kecamatan Sungailiat sebanyak 167 rumah makan/restoran, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Bakam sebanyak 1 rumah makan/restoran.

**Tabel 2.15**

Jumlah Akomodasi Hotel atau Penginapan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Kecamatan	2023
1	Sungailiat	17
2	Mendo Barat	1
3	Merawang	1
4	Pemali	-
5	Bakam	-
6	Puding Besar	-
7	Riau Silip	-
8	Belinyu	5
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

*Sumber : Bangka Dalam Angka Tahun 2023*

Di Kabupaten Bangka pada tahun 2023 jumlah hotel/penginapan terdapat 24 hotel/penginapan. Dan yang terbanyak berada di Kecamatan Sungailiat sebanyak 17 hotel/penginapan, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Merawang sebanyak 1 hotel/penginapan.

# BAB III



**DP2KBP3A**  
Kabupaten Bangka

## **BAB III**

### **PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

#### **A. Konsep Gender.**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan, sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Di Kabupaten Bangka, upaya ini tercermin dalam berbagai program dan kebijakan yang responsif gender yang tertuang dalam Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka.

Menurut "Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2024", data gender dan anak disajikan untuk berbagai bidang pembangunan. Profil ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangka.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat IKG sebesar 0,490, turun 0,007 poin dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender di beberapa kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bangka.

Implementasi Pengarusutamaan Gender, implementasi PUG di Kabupaten Bangka dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas terkait isu gender. Namun, beberapa hambatan seperti kurangnya partisipasi aktif dari organisasi yang tergabung masih menjadi tantangan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Pemerintah Kabupaten Bangka telah berupaya

mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting agar kesenjangan gender dapat diatasi dan manfaat pembangunan dirasakan oleh semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Peningkatan Kualitas SDM Perempuan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan, khususnya di pedesaan, untuk mendorong keadilan dan kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bangka terus berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua warganya.

## **B. Pembangunan Berspektif Gender.**

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menerbitkan "Profil Gender dan Anak 2024" yang memuat data dan analisis terkait isu gender dan anak di wilayah tersebut.

Salah satu indikator penting dalam profil ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Menurut "Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024", IPG Kabupaten Bangka menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024, mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan gender.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa Indeks

Ketimpangan Gender (IKG) provinsi pada tahun 2023 sebesar 0,490, turun 0,007 poin dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender di beberapa kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bangka juga telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) untuk periode 2021-2023. Renstra ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.

Upaya lain yang dilakukan adalah bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan di pedesaan, sebagai langkah mendorong keadilan dan kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bangka menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di daerah tersebut.

# BAB IV



**DP2KBP3A**  
Kabupaten Bangka

## **BAB IV**

### **GAMBARAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

### **DI KABUPATEN BANGKA**

Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa indikator yang mencerminkan kondisi pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bangka.

Gambaran kependudukan Kabupaten Bangka tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

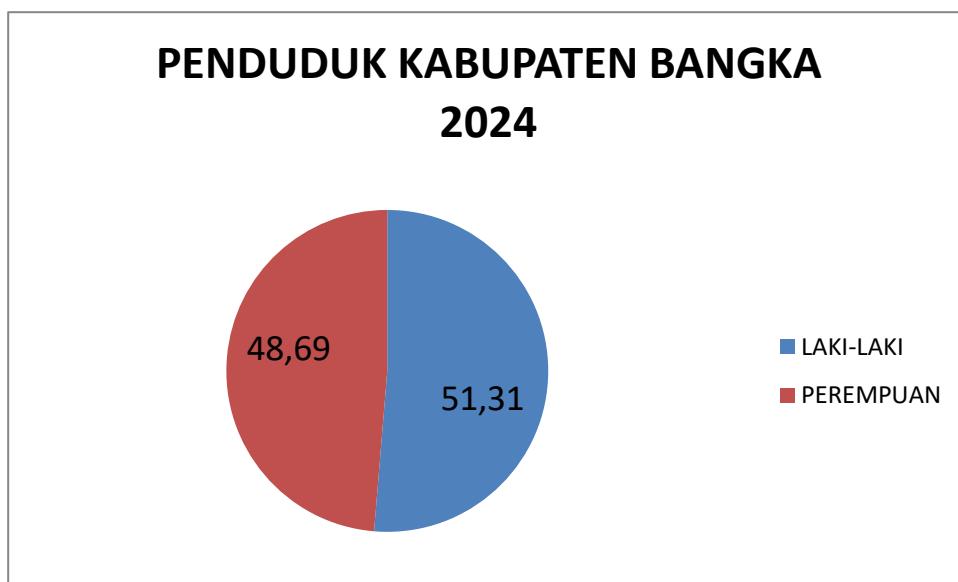
**Tabel 4.1**

Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Wilayah Kabupaten Bangka  
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI	PERSEN (%)	PEREMPUAN	PERSEN (%)	JUMLAH	PERSEN (%)
1	SUNGAILIAT	48,868	50,71	47,501	49,29	96,369	100,00
2	BELINYU	26,263	51,03	25,204	48,97	51,467	100,00
3	MERAWANG	16,216	51,30	15,394	48,70	31,61	100,00
4	MENDO BARAT	27,331	51,99	25,237	48,01	52,568	100,00
5	PEMALI	18,338	51,02	17,608	48,98	35,946	100,00
6	BAKAM	10,134	52,15	9,298	47,85	19,432	100,00
7	RIAU SILIP	15,378	51,77	14,326	48,23	29,704	100,00
8	PUDING BESAR	10,766	52,11	9,893	47,89	20,659	100,00
JUMLAH ...		173,294	51.31.00	164,461	48,69	337,755	100,00

*Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Babel Tahun 2024*

Grafik 4.1  
Penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin  
tahun 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Bangka secara kuantitas penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki. Jumlah perempuan sedikit dan boleh dikatakan berimbang dengan laki-laki tentunya akan menimbulkan pertanyaan, salah satunya bagaimana kualitas perempuan di Kabupaten Bangka.

Seiring dengan perjalanan waktu kaum perempuan di negeri sepintu sedulang sudah bisa dikatakan pada posisi lebih baik dibanding dengan kondisi mereka pada beberapa dekade yang lampau. Hampir tidak ada lagi terdengar kasus-kasus yang menyatakan terang-terangan yang bertedensi merendahkan kehadiran kaum perempuan dikarenakan perbedaan jenis kelamin. Sebab bagaimanapun kemajuan ilmu pengetahuan, pemahaman agama yang semakin baik , keterbukaan media informasi teknologi dan kemajuan dunia pendidikan menjadi sangat determinan serta berimplikasi bagi perubahan mindset

(pola Pikir) masyarakat pada semua level dan kelompok untuk dapat beradaptasi, menyesuaikan diri secara modern dan beradab.

Namun itu tidak bisa dianggap sebagai pendapat umum yang menampilkan peristiwa-peristiwa sosial berdimensi bias gender pada level tantanan kebijakan maupun praktik lapangan. Sesungguhnya bila kita perhatikan dengan seksama masih ada dan terlihat fakta ketimpangan sosial dan ketidakadilan gender dengan sangat jelas. Perempuan masih dianggap memiliki peran dan fungsi kurang beruntung, masih dipandang sebagai kelompok kerja identik dengan ranah teritorial dapur sumur dan kasur. Meskipun mereka bekerja di luar itu namun seringkali menempati posisi yang kurang strategis.

#### A.Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Peningkatan IPM di Kabupaten Bangka menunjukkan adanya upaya yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Grafik 4.2**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Tahun 2024



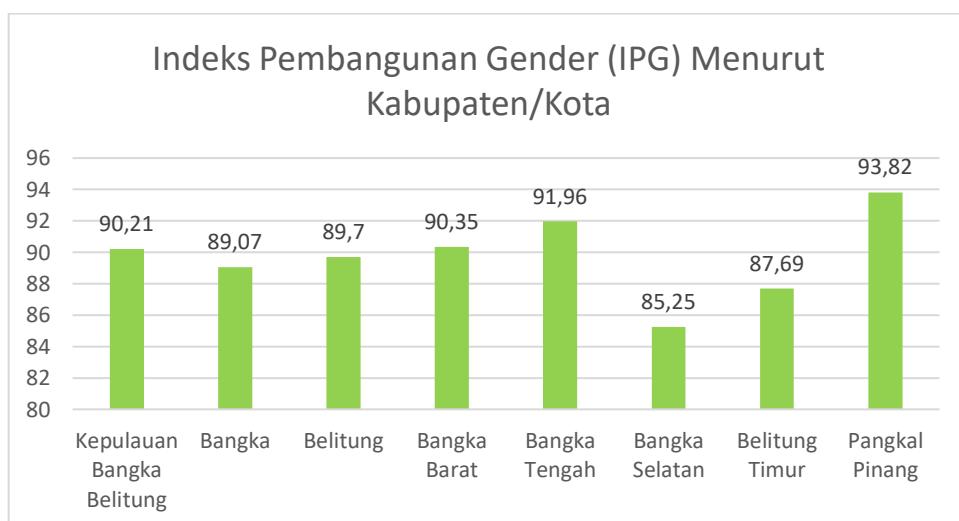
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Babel Tahun 2024

Jika dilihat perbandingan IPM Laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 dari data diatas disimpulkan bahwa IPM laki-laki ternyata lebih tinggi dari IPM perempuan.

## B. Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.

**Grafik 4.3**  
Indeks Pembangunan Gender (IPG ) Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun 2024



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2024*

Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2024, Kabupaten Bangka mencatatkan angka IPG sebesar 89,07. Angka ini bukan

sekadar statistik, melainkan potret sejauh mana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan telah dinikmati secara adil oleh penduduk laki-laki maupun perempuan.

Analisis Kedalaman Angka 89,07 Capaian 89,07 mengindikasikan bahwa kualitas hidup perempuan di Kabupaten Bangka telah mencapai sekitar 89% dari kualitas hidup laki-laki. Secara makro, angka ini menggambarkan bahwa kesenjangan gender di Kabupaten Bangka berada pada level yang terkendali, namun tetap memerlukan perhatian khusus pada beberapa sektor.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan Pemerintah Kabupaten Bangka melalui angka IPG 2024 ini menegaskan bahwa fondasi pembangunan berbasis gender telah terbentuk dengan kokoh. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan agar kontribusi mereka di pasar kerja dapat lebih optimal.

Dengan skor 89,07, Kabupaten Bangka berada pada jalur yang tepat menuju kesetaraan yang lebih inklusif. Diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun gender yang tertinggal dalam gerak laju pembangunan daerah.

### C. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

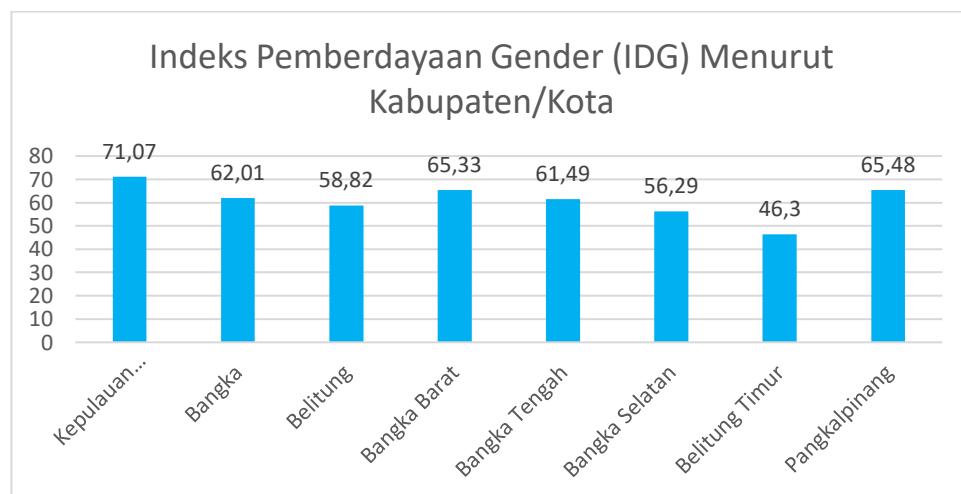
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik suatu wilayah. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang fokus pada kualitas hidup dasar, IDG lebih menitikberatkan pada partisipasi dan pengambilan keputusan.

IDG diukur berdasarkan tiga dimensi utama yang mencerminkan keterlibatan aktif perempuan:

1. Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan: Diukur melalui persentase keterwakilan perempuan di Parlemen (DPR/DPRD).
2. Partisipasi Ekonomi dan Pengambilan Keputusan: Diukur melalui dua indikator:
  - a. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional (manajer, teknisi, dan tenaga ahli).
  - b. Persentase perempuan di posisi kepemimpinan atau birokrasi.

Penguasaan Atas Sumber Daya Ekonomi: Diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan dalam dunia kerja (pendapatan upah non-pertanian).

**Grafik 4.4**  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Babel Tahun 2024

Skor ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka berada pada level sedang dalam hal pemberdayaan perempuan. Jika skala IDG adalah 0 hingga 100, maka angka 62,01 berarti perempuan di Bangka sudah memiliki peran yang cukup signifikan, namun masih ada jarak (gap) sekitar 37,99 poin untuk mencapai kesetaraan peran yang ideal dengan laki-laki di ranah publik.

Untuk memahami angka 62,01 ini secara lebih nyata, kita perlu melihat apa yang terjadi di lapangan di Kabupaten Bangka:

- a. Keterwakilan di Parlemen (Politik): Angka ini mencerminkan bahwa kursi di DPRD Kabupaten Bangka sudah mulai diisi oleh politisi perempuan, namun jumlahnya mungkin belum mencapai kuota ideal 30%. Suara perempuan dalam perumusan kebijakan daerah di Bangka sudah terdengar, tetapi laki-laki masih mendominasi panggung pengambilan keputusan politik.
- b. Perempuan sebagai Tenaga Profesional: Skor ini menandakan bahwa di perkantoran, rumah sakit, dan sekolah-sekolah di Kabupaten Bangka, sudah banyak perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai manajer, dokter, guru, atau tenaga ahli lainnya. Perempuan Bangka tidak hanya menjadi pekerja kasar, tetapi sudah masuk ke level manajerial.
- c. Kontribusi Pendapatan (Ekonomi): Secara narasi, angka 62,01 menunjukkan bahwa perempuan di Bangka memiliki kemandirian finansial yang cukup baik. Mereka berkontribusi pada ekonomi keluarga

dan daerah melalui upah yang mereka terima, meskipun kemungkinan besar rata-rata pendapatan perempuan masih di bawah rata-rata pendapatan laki-laki di wilayah tersebut.

# BAB V



## **BAB V**

### **KEPENDUDUKAN**

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Penduduk merupakan faktor penentu pembangunan, karena dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan penduduk tidak hanya berperan sebagai pelaku pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus dimonitor setiap saat, karena pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas penduduk. Oleh karena itu komposisi penduduk yang menggambarkan karakteristik penduduk harus dijadikan pertimbangan agar kondisi penduduk dapat menunjang pembangunan. Hal ini dipandang sangat penting karena perencanaan dan pengelolan sumber daya manusia sangat berkaitan dengan data dan informasi kependudukan tersebut.

## A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Dinamika Penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2024 menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka secara keseluruhan sebesar 327.394 jiwa yang terdiri atas 167.890 orang laki-laki dan 159.504 orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu 51 %, sedangkan penduduk perempuan 48 %. Pada Tabel 5.1 menunjukan kecamatan Sungailiat merupakan kecamatan dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbesar yaitu 94.190 jiwa dan di ikuti oleh kecamatan Mendo Barat sebesar 50.378 jiwa. Adapun Kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Bakam hanya sebesar 18.828 jiwa. Lebih jelasnya ditampilkan tabel berikut:

**Tabel 5.1**

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI	PERSEN (%)	PEREMPUAN	PERSEN (%)	JUMLAH	PERSEN (%)
1	SUNGAILIAT	48,868	14.47	47,501	14.06	96,369	28.53.00
2	BELINYU	26,263	0,345833	25,204	07.46	51,467	15.24
3	MERAWANG	16,216	0,222222	15,394	04.56	31,61	09.36
4	MENDO BARAT	27,331	08.09	25,237	07.47	52,568	15.56
5	PEMALI	18,338	05.43	17,608	05.21	35,946	0,461111
6	BAKAM	10,134	03.00	9,298	0,135417	19,432	0,260417
7	RIAU SILIP	15,378	04.55	14,326	04.24	29,704	0,388194
8	PUDING BESAR	10,766	03.19	9,893	0,147917	20,659	06.12
JUMLAH ...		173,294	51.31.00	164,461	48.69	337,755	100.00.00

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tahun 2024*

Pada Tabel 5.1. menunjukan dari 8 Kecamatan terdapat 337.755 jiwa penduduk persentase jumlah penduduk perempuan tidak terlalu berbeda yaitu 164.461 jiwa atau 48,69% dan laki laki 173.294 jiwa atau 51,31%. Lebih jelasnya dapat di lihat pada diagram di bawah ini.

## B. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Informasi tentang jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan Kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2**

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024

KECAMATAN	PENDUDUK											
	0 - 4 TAHUN				5- 9 TAHUN				10 - 14 TAHUN			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN
SUNGAILIA T	3,191	3,059	6,25	0,10	4,174	3,858	8,032	0,11	4,651	4,404	9,055	0,13
BELINYU	1,47	1,477	2,947	0,06	2,135	1,97	4,105	0,06	2,594	2,458	5,052	0,08
MERAWA N G	1,174	1,094	2,268	0,05	1,427	1,27	2,697	0,06	1,631	1,546	3,177	0,07
MENDO BARAT	2,051	1,977	4,028	0,05	2,56	2,385	4,945	0,07	2,788	2,608	5,396	0,08
PEMALI	1,209	1,158	2,367	0,05	1,641	1,506	3,147	0,06	1,883	1,763	3,646	0,05
BAKAM	763	699	1,462	0,03	951	898	1,849	0,04	955	898	1,853	0,04
RIAU SILIP	976	935	1,911	0,04	1,344	1,236	2,58	0,05	1,5	1,482	2,982	0,06
PUDING BESAR	772	806	1,578	0,03	1,113	952	2,065	0,04	1,01	954	1,964	0,04
<i>jumlah</i>	<i>11,61</i>	<i>11,21</i>	<i>22,81</i>	<i>0,30</i>	<i>15,35</i>	<i>14,08</i>	<i>29,42</i>	<i>0,38</i>	<i>17,01</i>	<i>16,11</i>	<i>33,13</i>	<i>0,43</i>

KECAMATAN	PENDUDUK											
	15-19				20-24				25-29			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	4,23	3,996	8,226	02.44	4,06	3,825	7,885	02.33	3,46	3,253	6,713	0,11
BELINYU	2,275	2,226	4,501	01.33	2,167	2,131	4,298	01.27	1,744	1,649	3,393	01.00
MERAWANG	1,456	1,299	2,755	0,057	1,268	1,29	2,558	0,053	1,15	1,15	2,3	0,047
MENDO BARAT	2,33	2,323	4,653	01.38	2,441	2,234	4,675	01.38	2,294	2,167	4,461	01.32
PEMALI	1,682	1,543	3,225	0,066	1,445	1,399	2,844	0,058	1,219	1,181	2,4	0,049
BAKAM	839	786	1,625	00.48	781	805	1,586	00.47	738	717	1,455	00.43
RIAU SILIP	1,355	1,331	2,686	0,056	1,252	1,227	2,479	0,051	1,087	961	2,048	0,042
PUDING BESAR	830	820	1,65	00.49	900	882	1,782	00.53	829	762	1,591	00.47
JUMLAH	15	14,32	29,32	0,381	14,31	13,79	28,11	08.32	12,52	11,84	24,36	07.21

KECAMATAN	PENDUDUK											
	30-34				35-39				40-44			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	3,313	3,287	6,6	0,11	3,719	3,747	7,466	0,10	4,259	3,976	8,235	0,11
BELINYU	1,752	1,573	3,325	0,07	1,951	1,933	3,884	0,05	2,289	2,086	4,375	0,06
MERAWANG	1,11	1,125	2,235	0,05	1,38	1,336	2,716	0,06	1,434	1,23	2,664	0,05
MENDO BARAT	2,108	1,878	3,986	0,05	2,425	2,086	4,511	0,07	2,124	1,838	3,962	0,05
PEMALI	1,168	1,279	2,447	0,05	1,487	1,58	3,067	0,06	1,688	1,635	3,323	0,07
BAKAM	723	680	1,403	0,03	936	809	1,745	0,04	864	726	1,59	0,03
RIAU SILIP	1,037	1,023	2,06	0,04	1,313	1,24	2,553	0,05	1,383	1,134	2,517	0,05
PUDING BESAR	768	751	1,519	0,03	1,013	775	1,788	0,04	920	833	1,753	0,04
JUMLAH	11,98	11,6	23,58	0,32	14,22	13,51	27,73	0,35	14,96	13,46	28,42	0,36

KECAMATAN	PENDUDUK											
	45-49				50-54				55-59			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	3,57	3,438	7,008	0,09	2,932	2,712	5,644	0,09	2,312	2,193	4,505	0,06
BELINYU	1,992	1,751	3,743	0,05	1,678	1,436	3,114	0,06	1,231	1,18	2,411	0,05
MERAWANG	1,141	957	2,098	0,04	886	815	1,701	0,03	654	654	1,308	0,03
MENDO BARAT	1,748	1,502	3,25	0,07	1,406	1,305	2,711	0,06	1,136	1,031	2,167	0,04
PEMALI	1,508	1,344	2,852	0,06	1,106	960	2,066	0,04	757	659	1,416	0,03
BAKAM	713	640	1,353	0,03	587	485	1,072	0,02	453	398	851	0,02
RIAU SILIP	1,158	990	2,148	0,04	921	822	1,743	0,04	717	615	1,332	0,03
PUDING BESAR	757	630	1,387	0,03	538	496	1,034	0,02	432	380	812	0,02
JUMLAH	12,59	11,25	23,84	0,30	10,05	9,031	19,09	0,25	7,692	7,11	14,8	0,19

KECAMATAN	PENDUDUK											
	60-64				65-69				70-74			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	1,735	1,964	3,699	0,05	1,492	1,636	3,128	0,06	975	1,11	2,085	0,04
BELINYU	1,002	1,006	2,008	0,04	856	1,004	1,86	0,04	639	703	1,342	0,03
MERAWANG	568	573	1,141	0,02	426	462	888	0,02	286	307	593	0,01
MENDO BARAT	840	730	1,57	0,03	504	505	1,009	0,02	320	306	626	0,01
PEMALI	527	556	1,083	0,02	478	496	974	0,02	325	304	629	0,01
BAKAM	356	318	674	0,01	213	185	398	0,01	143	121	264	0,01
RIAU SILIP	496	444	940	0,02	358	376	734	0,02	272	238	510	0,01
PUDING BESAR	363	330	693	0,01	246	241	487	0,01	154	127	281	0,01
JUMLAH	5,887	5,921	11,81	0,16	4,573	4,905	9,478	0,14	3,114	3,216	6,33	0,102

KECAMATAN	PENDUDUK			
	75+			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	795	1,043	1,838	0,04
BELINYU	488	621	1,109	0,02
MERAWANG	225	286	511	0,01
MENDO BARAT	256	362	618	0,01
PEMALI	215	245	460	0,01
BAKAM	119	133	252	0,00
RIAU SILIP	209	272	481	0,01
PUDING BESAR	121	154	275	0,01
JUMLAH	2,428	3,116	5,544	0,09

Dari Tabel 5.2. nampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar berada pada kelompok umur dewasa 224.910 jiwa atau 68,69 % (kisaran 15 – 64 Tahun). Selanjutnya terdapat kelompok umur lanjut (65 tahun keatas ) sebesar 21.285 jiwa atau 65,01 %. Dengan demikian dapat dikatakan komposisi penduduk Kabupaten Bangka sangat mendukung proses percepatan pembangunan.

Penduduk belum produktif disebut juga dengan angka ketergantungan muda, sedangkan tidak produktif lagi disebut dengan angka ketergantungan tua. Umur produktif dikaitkan dengan aktivitas dalam bekerja yang sudah bisa menghasilkan barang dan jasa. Sehingga penduduk yang dinyatakan berusia produktif apabila memasuki masa usia kerja. Penduduk usia non produktif yaitu usia 65 Tahun ke atas terdapat 65,61%. Persentase ini menunjukan cukup besar jumlah penduduk usia lanjut. Yang menggambarkan umur harapan hidup

penduduk di Kabupaten Bangka.

### C. Komposisi Penduduk Menurut Karateristik Sosial

#### 1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini mengambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan disuatu wilayah pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin perwilayah dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukan karakteristik berdasarkan jenjang pendidikan di suatu wilayah sekaligus kualitas SDM.

**Tabel 5.3**

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024

KECAMATAN	TIDAK/BLM SEKOLAH				BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT				TAMAT SD/SEDERAJAT			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	13,762	12,777	26,539	0,35	4,448	4,117	8,565	0,12	8,256	9,374	17,63	0,22
BELINYU	6,823	6,637	13,46	0,19	2,639	2,376	5,015	0,08	6,77	7,068	13,838	0,17
MERAWANG	5,201	4,845	10,046	0,15	1,565	1,398	2,963	0,06	3,73	4,082	7,812	0,10
MENDO BARAT	9,435	9,06	18,495	0,24	3,255	2,805	6,06	0,10	7,612	7,201	14,813	0,19
PEMALI	5,485	5,114	10,599	0,13	1,618	1,509	3,127	0,06	3,211	3,375	6,586	0,11
BAKAM	3,304	3,092	6,396	0,10	1,088	1,029	2,117	0,04	2,997	2,883	5,88	0,09
RIAU SILIP	4,96	4,827	9,787	0,15	1,951	1,701	3,652	0,05	4,462	4,291	8,753	0,12
PUDING BESAR	3,688	3,52	7,208	0,09	1,132	1,071	2,203	0,05	3,081	2,916	5,997	0,10
	52,658	49,872	102,53	1,28	17,696	16,006	33,702	0,44	40,119	41,19	81,309	1,00

KECAMATAN	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA				DIPLOMA IV/STRATA I				STRATA-II			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	832	1,17	2,002	0,04	2,39	2,722	5,112	0,08	190	122	312	0,01
BELINYU	215	279	494	0,01	430	674	1,104	0,02	17	12	29	0,00
MERAWANG	119	159	278	0,01	419	482	901	0,02	27	21	48	0,00
MENDO BARAT	155	201	356	0,01	588	674	1,262	0,03	40	30	70	0,00
PEMALI	322	525	847	0,02	883	1,005	1,888	0,04	50	30	80	0,00
BAKAM	51	64	115	0,00	155	220	375	0,01	7	5	12	0,00
RIAU SILIP	50	88	138	0,00	161	263	424	0,01	9	6	15	0,00
PUDING BESAR	66	92	158	0,00	177	195	372	0,01	7	6	13	0,00
JUMLAH	1,81	2,578	4,388	0,06	5,203	6,235	11,438	0,15	347	232	579	0,01

KECAMATAN	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA				DIPLOMA IV/STRATA I				STRATA-II			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	832	1,17	2,002	0.05	2,39	2,722	5,112	0.15	190	122	312	0.09
BELINYU	215	279	494	0.15	430	674	1,104	0.33	17	12	29	0.01
MERAWANG	119	159	278	0.08	419	482	901	0.27	27	21	48	0.01
MENDO BARAT	155	201	356	0.11	588	674	1,262	0.37	40	30	70	0.02
PEMALI	322	525	847	0.25	883	1,005	1,888	0.56	50	30	80	0.02
BAKAM	51	64	115	0.03	155	220	375	0.11	7	5	12	0.00
RIAU SILIP	50	88	138	0.04	161	263	424	0.13	9	6	15	0.00
PUDING BESAR	66	92	158	0.05	177	195	372	0.11	7	6	13	0.00
JUMLAH	1,81	2,578	4,388	0.30	5,203	6,235	11,438	0.39	347	232	579	0.17

KECAMATAN	STRATA-III			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
SUNGAILIAT	15	7	22	0,01
BELINYU	1	0	1	0,00
MERAWANG	4	1	5	0,01
MENDO BARAT	4	1	5	0,01
PEMALI	3	1	4	0,01
BAKAM	0	0	0	0,00
RIAU SILIP	0	0	0	0,00
PUDING BESAR	0	0	0	0,00
JUMLAH	27	10	37	0,03

Dari tabel terlihat bahwa Kabupaten Bangka 10,71% berpendidikan SLTA/sederajat, 14,24% berpendidikan SLTP/sederajat, 28,45% berpendidikan SD/sederajat. Untuk

tingkat pendidikan yang lebih tinggi mulai dari diploma IV sampai strata I hanya 3,36%.

## 2. Penduduk Menurut Status Kawin

Bagian ini mengambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin meliputi belum kawin, kawin, cerai. Dalam hal ini konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seseorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto).

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

**Tabel 5.4**

Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PENDUDUK							
		BELUM KAWIN				KAWIN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUA N	JUMLAH	PERSEN (%)	LAKI-LAKI	PEREMPUA N	JUMLAH	PERSEN (%)
1	SUNGAILIAT	25,194	20,781	45,975	0,58	21,388	21,424	42,812	0,55
2	BELINYU	13,49	10,913	24,403	0,31	11,36	11,347	22,707	0,30
3	MERAWANG	8,474	6,819	15,293	0,20	7,11	7,125	14,235	0,18
4	MENDO BARAT	15,064	11,88	26,944	0,36	11,418	11,439	22,857	0,30
5	PEMALI	9,345	7,776	17,121	0,21	8,231	8,24	16,471	0,23
6	BAKAM	5,183	4,034	9,217	0,13	4,555	4,561	9,116	0,13
7	RIAU SILIP	7,771	6,192	13,963	0,18	6,91	6,878	13,788	0,17
8	PUDING BESAR	5,639	4,373	10,012	0,15	4,753	4,756	9,509	0,14
<i>JUMLAH ...</i>		<i>90,16</i>	<i>72,768</i>	<i>162,928</i>	<i>2,02</i>	<i>75,725</i>	<i>75,77</i>	<i>151,495</i>	<i>44.85</i>

Tabel diatas menyajikan komposisi penduduk menurut status perkawinan , dalam komposisi terlihat bahwa persentase penduduk laki- laki lebih rendah dari perempuan. Disamping itu terlihat pula komposisi penduduk memiliki akta perkawinan lebih banyak

# BAB VI



## **BAB VI**

### **GENDER BIDANG PENDIDIKAN**

Di Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian, pendidikan merupakan cara untuk membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan.

Indikator utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan suatu daerah diantaranya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Mewujudkan SDM yang berkualitas dapat dilakukan salah satu diantaranya melalui pendidikan. Sehubungan dengan itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya antara lain : Angka partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi kasar (APK) , serta angka partisipasi murni (APM).

Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang tua kandung, orang lain, tertapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi. Pada era yang serba canggih ini pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara sederhana pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan.

Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan

dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpisah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias Gender yang ditimbulkan.

Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan, sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia Indonesia yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan pembangunan suatu negara atau bangsa tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang paling berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sektor pendidikan harus menjadi perhatian penting baik oleh pemerintah maupun anggota masyarakat.

#### **A.Sarana dan Prasarana Sekolah.**

Sarana pendidikan adalah perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan. Suksesnya suatu kegiatan pembelajaran didikung oleh adanya pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari sarana/fasilitas pendidikan yang tersedia. Pendidikan yang merata dan berkelanjutan memerlukan dukungan yang besar dari semua kalangan baik dari pemerintah pusat terlebih lagi dari masyarakat, hal yang paling utama adalah tersedianya fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana sekolah. Pada tabel 6.1 ditunjukkan jumlah sarana sekolah sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

Jumlah Sarana Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	SEKOLAH	JUMLAH	GURU	MURID
Sekolah Negeri				
1	TK/ PAUD	8	54	809
2	SD	166	1.732	31.044
3	SMP	32	651	10.651
Sekolah Swasta				
1	TK/ PAUD	67	178	3.080
2	SD	18	141	3.739
3	SMP	17	173	3.216
	Jumlah	308	2.929	52.539

*Sumber : Dindikpora Kab. Bangka Tahun 2024*

Pada tabel 6.1 jumlah sarana sekolah negeri yaitu 308 unit yang terdiri dari TK/Paud negeri 8 unit, TK/Paud swasta 67 unit, Sekolah Dasar Negeri 166 unit dan sekolah dasar swasta 18 unit, kemudian SMP terdiri dari SMP Negeri 32 unit dan SMP swasta 17 unit.

Besarnya jumlah sarana pendidikan pada tingkat dasar ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas anak di Kabupaten Bangka. Karena diketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas jumlah penduduk salah satu indikatornya adalah meningkatkan lama pendidikan anak. Dengan demikian ketersediaan pendidikan pada SD dan SMP sederajat sangatlah menunjang upaya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Bangka. Sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.

## **B. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

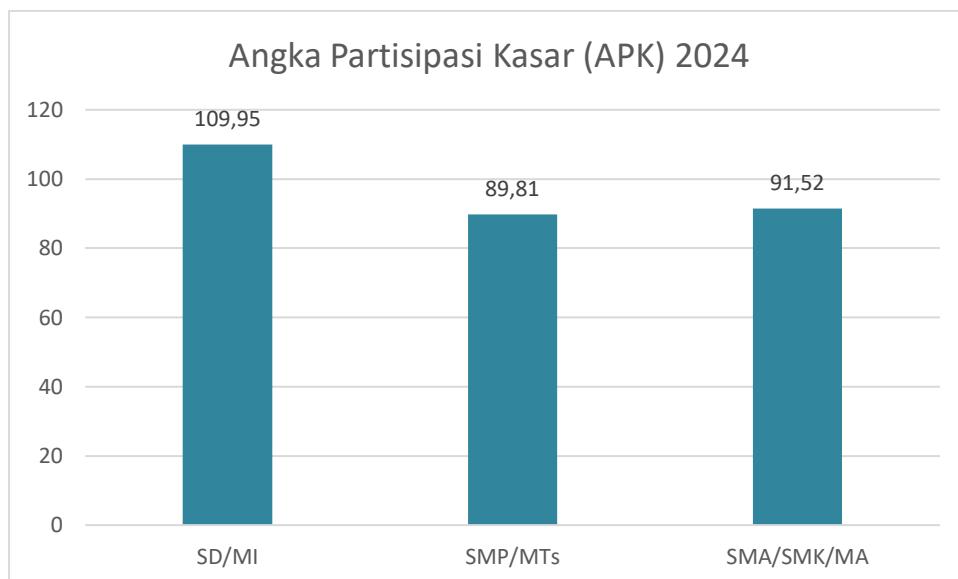
Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan dalam memperluas kesempatan bagi penduduk yang mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai Angka partisipasi kasar (APK) bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan Angka partisipasi kasar (APK) diperoleh dari berapa anak usia 0-6 tahun yang bersekolah di jenjang PAUD/sederajat, berapa anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/sederajat, berapa anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, dan berapa anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/sederajat.

### Grafik 6.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka tahun 2024



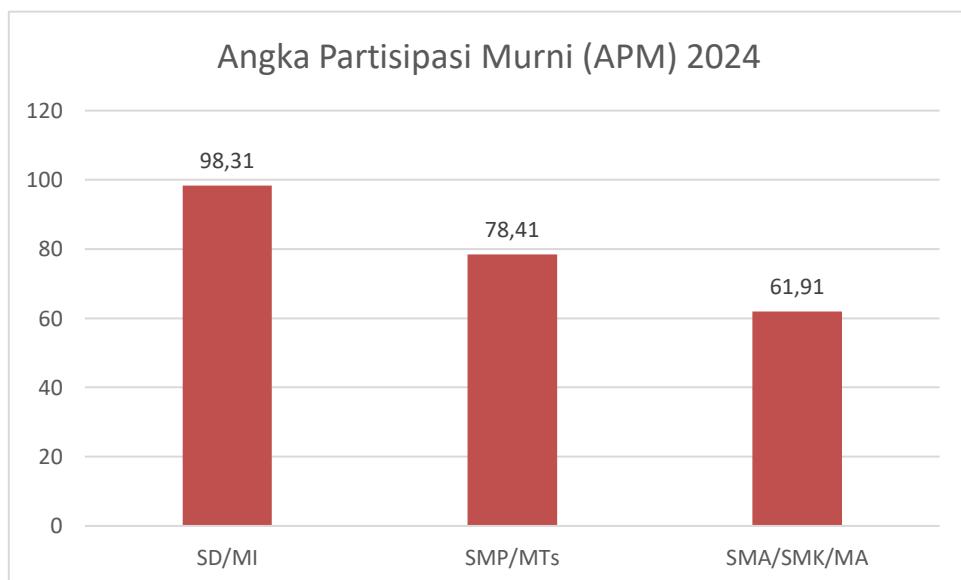
Pada Grafik diatas merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan..

### C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni (APM) ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

**Grafik 6.3**

#### **Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2024**



proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. APM berguna untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

#### **D.Angka Partisipasi Sekolah ( APS).**

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang sampai dengan tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan suatu indikator yang mengambarkan tingkat partisipasi sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

**Grafik 6.4**  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur dan Jenis  
Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024



Merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Sedangkan angka partisipasi sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun sebesar 70,42.

## E. Angka Melek Huruf

Pendidikan menjadi satu syarat utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang terdidik akan memiliki pengetahuan yang lebih luas serta daya tawar lebih kuat, yang tentu saja akan bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupannya. Terkait dengan pendidikan dan pengetahuan ini, indikator yang paling mendasar adalah kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. Hal ini karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. Angka melek huruf merupakan

salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Angka melek huruf (AMH) menyajikan persentase/proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada suatu tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah dalam menyerap informasi pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator maka semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia di suatu daerah. Indikator Angka melek huruf (AMH) dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buat huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih banyak ditemukan penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf sehingga mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Persentase penduduk di Kabupaten Bangka berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2022 adalah 99,61%. Hal ini

menunjukan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 6.5**

**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2024**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Pesentase
1	15-19	100
2	20-24	100
3	25-29	100
4	30-34	100
5	35-39	100
6	40-44	99,06
7	45-49	100
8	50+	95,39
	Jumlah Total	

*Sumber : BPS Susenas 2023*

Dari tabel diatas terlihat pencapaian angka melek huruf (AMH) penduduk umur 15+ adalah sebesar 100% yang artinya dari 100 persen penduduk Kabupaten Bangka telah mampu membaca dan menulis baik tulisan latin, arab, maupun huruf lainnya. Penduduk usia 15 tahun keatas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin.

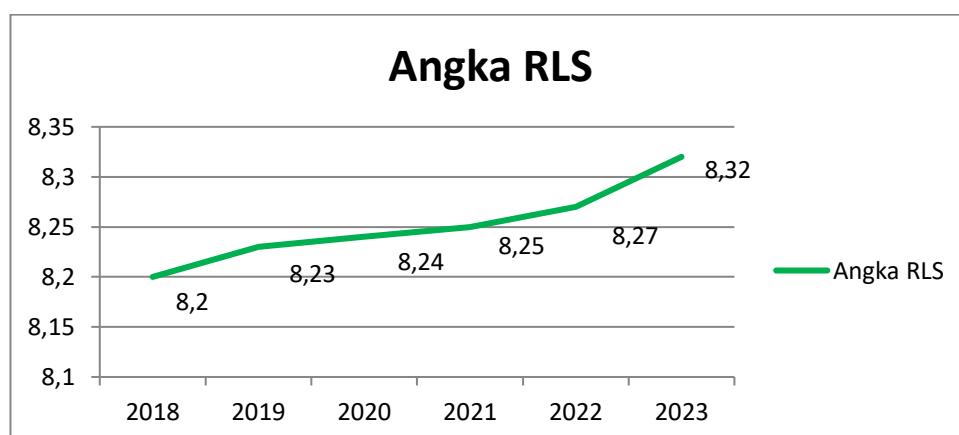
## **F. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu

sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata -rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

### Grafik 6.5

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangka  
Tahun 2018 s.d 2023



Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk bersekolah. Sedangkan untuk Kabupaten Bangka rata-rata lama sekolah 8,32 (tahun 2023). Ini berarti penduduk Kabupaten Bangka sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka sebesar 8,20 tahun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2023 mencapai 8,32 tahun.

## **G. Angka Putus Sekolah**

Masih banyaknya jumlah anak putus sekolah menjadi permasalahan di Negara ini yang tentu menghambat kemajuan daya saing bangsa. Negara kita telah menjamin bahwa setiap warga telah menjamin bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan diwajibkan oleh Negara bagi setiap warga Negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayainya. Sebagaimana inti dari pasal 31 undang-undang dasar (UUD) 1945 dimana hak dan kewajiban tersebut sejalan dengan langkah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang disebutkan dalam pembukaan alinea ke -4.

Penyebab anak putus sekolah dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang menjadi faktor utama. Karena kondisi ekonomi keluarga yang punya kesulitan masing-masing sehingga anak akan menjadi putus sekolah sehingga anak akan membantu orang tua untuk mencari nafkah. Selain faktor kondisi ekonomi itu terdapat sejumlah alas an lain yang memicu terjadinya anak putus sekolah seperti kondisi keluarga yang kurang mendukung, orang tua yang bercerai, dan adanya perundungan dilingkungan sekolah, karena hamil dan terpaksa menikah muda. Menyikapi beragam faktor atau alasan anak putus sekolah penanganan anak putus sekolah dapat dilakukan dengan cara prevensi jika permasalahan belum terjadi dan intervensi jika sudah terjadi. Prevensi dapat dilakukan dengan empat hal yaitu:

1. Identifikasi dini kepada siswa yang beresiko putus sekolah. Identifikasi dapat dilihat dari sikap, perilaku, dan kedisiplinan di sekolah.
2. Pendampingan intensif oleh guru atau lingkungan siswa.
3. Psikoedukasi melalui pembekalan diri kepada siswa untuk menghindari faktor-faktor penyebab putus sekolah.
4. Memberikan pelatihan atau memberikan keterampilan kecakapan hidup atau yang terkait minat siswa.

Intervensi dapat dilakukan salah satunya melalui konseling yang ditunjukan kepada individu atau kelompok. Intervensi konseling terwujud langsung kepada siswa ataupun melalui keluarga, teman sebaya, hingga pihak sekolah. Tindak prevensi dan intervensi diharapkan dapat menekan angka putus sekolah hingga meningkatkan psikologis dan kualitas siswa. Para guru bisa menjalankan pendekatan psikososial untuk mencegah dan mengatasi permasalahan putus sekolah yang dialami siswa. Melalui konseling psikososial para guru dapat menggali atau menekankan kepada dua faktor yaitu internal dan eksternal siswa.

Faktor internal yang dapat digali dari siswa adalah identifikasi masalah siswa, meningkatkan self- esteem atau harga diri, GRIT atau kekuatan passion dan kegigihannya, resiliensi atau ketangguhan, efikasi diri atau percaya diri, gambaran diri di masa depan, serta pilihan karier ke depannya. Kemudian faktor eksternal

yaitu adanya dukungan sosial dari lingkungan, peran sekolah dalam menciptakan lingkungan nyaman, serta bantuan sosial ekonomi dari sekolah.

Selanjutnya home visit yang dapat dilakukan juga oleh para guru kepada siswa, dan mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi asertif yang dapat dilakukan siswa. Banyaknya anak yang putus sekolah masih menjadi persoalan yang mendasar bagi Indonesia terutama pemerintahan yang ada setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu persoalan anak putus sekolah harus mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan. Seluruh elemen baik itu pemerhati pendidikan mulai dari keluarga, komunitas, dan seluruh stakeholders harus punya perhatian pada urusan pendidikan nasional dan mengurangi angka putus sekolah harus mulai menjadi perhatian bersama.

Gambaran mengenai putus sekolah Kabupaten Bangka dapat terlihat dari Tabel 6.8 yaitu angka putus sekolah. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa saja yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftar di lembaga penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) resmi yang terdaftar di departemen pendidikan nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh Negara. Kejar Paket A yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SD sederajat, Kejar Paket B yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP/Mts sederajat, Kejar Paket C yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMA/Sederajat. Banyak faktor yang menyebabkan

masyarakat sekolah kejar paket diantaranya :

1. Faktor Ekonomi
2. Putus Sekolah
3. Tekanan Orang Tua
4. Konflik Keluarga
5. Bullying
6. Tempat Tinggal Yang Tidak Tetap
7. Kenakalan Remaja

#### **H. Angka Kelulusan Paket A, B dan C**

Kejar paket A,B, dan C adalah solusi bagi kita yang sudah berusia diatas sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan dan ijazah setara dengan SD, SMP atau SMA. Melalui program kejar paket, siswa akan mendapatkan pelajaran setara sesuai dengan tingkatannya. Kegiatan pembelajaran kejar paket dilaksanakan secara fleksibel dibandingkan dengan sekolah formal . Bagi kita yang ingin mengikuti paket A,B,dan C tidak perlu takut serta malu, tidak ada kata terlambat untuk belajar.

Adapun tujuan pelaksanaan program kejar paket A, B, dan C adalah:

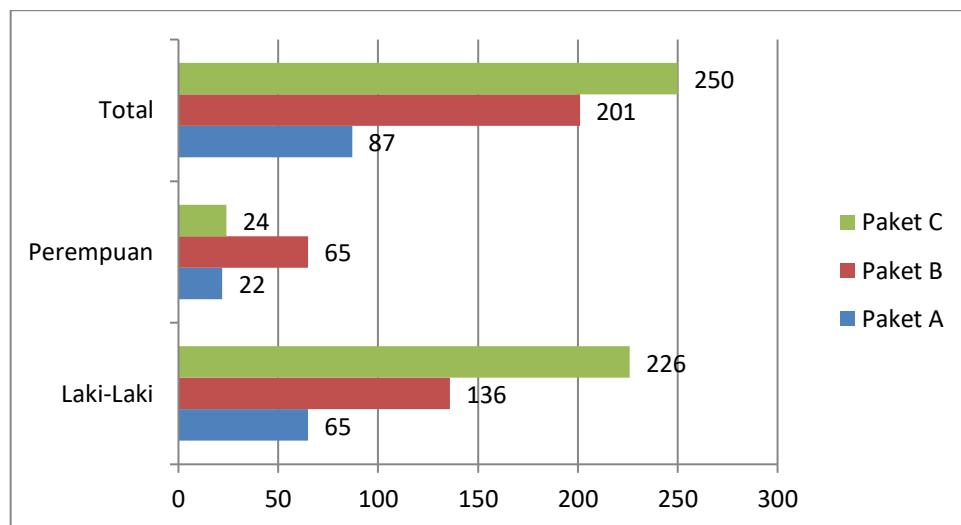
1. Memberikan akses/layanan pendidikan yang bermutu kepada warga masyarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) masyarakat dapat meningkat.
2. Untuk terselenggaranya akses/layanan pemerolehan pendidikan bagi masyarakat

(peserta program paket A, B, dan C ) yang belum menempuh tingkat lanjutan.

3. Agar pesertadidik program paket A,B, dan C baik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik sesuai dengan kebutuhannya.
4. Semua peserta program paket A,B, dan C dapat mengikuti program pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar.
5. Untuk menurunkan angka anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jalur pendidikan formal.

Kejar paket A,B,dan C adalah pendidikan masyarakat formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah. Program ini ditunjukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang mampuatau beruntung, tidak sekolah, putus sekolah,dan putus lanjutan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup. Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal diharapkan dapat berkontribusi lebih banyak terutama dalam mendukung suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yakni melewai penyelenggaraan program pendidikan kejar paket A,B dan C. Gambaran mengenai Jumlah angka kelulusan paket A, B, dan C Kabupaten Bangka dapat terlihat dari Tabel 6.9 .

**Grafik 6.7**  
**Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B dan C Menurut Jenis  
 Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024**



Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang mengejar paket baik paket A, B dan C sebesar 427 Orang, sedangkan penduduk perempuan sebesar 111 orang.

Pada grafik atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang mengejar paket baik paket A, B dan C lebih besar dari pada penduduk perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa kesempatan belajar bagi laki-laki yang putus sekolah lebih besar daripada perempuan. Jumlah peserta Kejar Paket C lebih banyak daripada Paket A dan B. Hal ini sejalan dengan banyaknya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/sederajat Kemungkinan ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat sekolah kejar paket diantaranya ; faktor ekonomi, putus sekolah, tekanan orang tua, konflik keluarga, kenakalan remaja, dll.

# BAB VII



**DP2KBP3A**  
Kabupaten Bangka

## **BAB VII**

### **GENDER BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL**

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenaga kerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan.

Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pada aspek ini akan tergambar bagaimana penduduk memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga mereka. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk yang telah bekerja dan penduduk yang menganggur. Banyak penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung juga menunjukkan banyaknya jumlah

penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan sumber penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian diusahakan agar perekonomian dapat menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian tersebut.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur kinerja pemerintah suatu wilayah atas pembangunan yang sudah dilakukan. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam yang tersedia (SDA), faktor sosial budaya, hingga perkembangan teknologi. Kesetaraan gender juga sejalan berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Perempuan yang memiliki pekerjaan ataupun pendapatan sendiri akan dapat menopang hidup dirinya sendiri serta keluarganya. Kegiatan konsumsi yang dilakukan juga turut meningkatkan daya beli yang nantinya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender juga mendorong peran perempuan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Kesempatan lapangan kerja yang luas juga diperlukan untuk meningkatkan peran perempuan saat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

## A.Ekonomi

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran

per-kapita Kabupaten Bangka memusat pada golongan pengeluaran Rp. 750.000,- lebih dari Rp 1.500.000. Hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka mengeluarkan rata-rata pengeluaran dalam range tersebut sebulan (96,35%). Sedangkan penduduk yang mengeluarkan pengeluaran kurang dari Rp. 750000,- sebesar 3,65% dan lebih dari Rp. 1.500.000,- sebesar 42,14%.

Dari tabel 7.1 kita dapat melihat bahwa pengeluaran untuk makanan lebih besar dibanding pengeluaran untuk non makanan. Hal ini menggambarkan kebutuhan penduduk di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 masih prioritas pada kebutuhan makanan/pangan. Dan jika diperhatikan jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah makanan dan minuman jadi dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar 864.940 rupiah. Untuk Komoditas bukan makanan yang membutuhkan pengeluaran terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar 668.623 rupiah.

**Tabel 7.1**

Jumlah Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan  
Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Bangka Tahun  
2021 s.d 2023

NO	Komoditas	Tahun		
		2021	2022	2023
<b>Makanan</b>				
1	Padi-padian	5,64	5	5,04
2	Umbi-umbian	0,45	0,48	0,59
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	6,77	7,64	7,22
4	Daging	2,9	3,95	3,23
5	Telor dan Susu	3,06	3,18	3,10

6	Sayuran-sayuran	4,65	5,01	4,70
7	Kacang-kacangan	0,75	0,66	0,78
8	Buah-buahan	2,47	3,08	2,87
9	Minyak dan Kelapa	0,06	1,11	0,95
10	Bahan minuman	1,42	1,24	1,19
11	Bumbu-bumbuan	1,78	1,72	1,69
12	Konsumsi lainnya	1,19	1,1	1,22
13	Makanan dan minuman jadi	13,65	14,77	12,42
14	Rokok	6,83	7,47	7,13
	<b>Jumlah Makanan</b>	<b>52,48</b>	<b>56,4</b>	<b>52,12</b>
	<b>Bukan Makanan</b>			
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	25,64	25,17	25,81
16	Aneka komoditas dan jasa	9,62	8,46	9,37
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,54	2,4	2,70
18	Komoditas tahan lama	4,78	2,78	4,88
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	4,26	3,92	3,50
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	0,67	0,87	1,62
	<b>Jumlah Bukan Makanan</b>	<b>47,52</b>	<b>43,6</b>	<b>47,88</b>
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Tahun 2023

**Tabel 7.2**  
**Jumlah Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bangka Tahun 2020 s.d 2023**

NO	Jenis Kelamin	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	18.362	18.375	18.961	1.864.269

2	Perempuan	8.188	8.195	8.628	2.074.942
---	-----------	-------	-------	-------	-----------

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari tabel diatas perbandingan tingkat pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan masih cukup jauh dari imbang terbukti tahun 2022 di Kabupaten Bangka untuk laki-laki pengeluaran perkapita sebesar 1.864.269 dan untuk perempuan 2.074.942 (jika dihitung dalam Ribu/Rupiah/Orang/Tahun).

Perbandingan selisih pengeluaran perempuan hampir dari setengahnya pengeluaran perkapita laki-laki, dengan besaran Rp. 10.333/orang/tahun. Walaupun masih jauh dibawah laki-laki tetapi jika dilihat dari tahun 2020 ke tahun 2022 pengeluaran perkapita untuk perempuan di Kabupaten Bangka bertambah.

Jika kita analisis pada faktor pengeluaran perkapita memiliki pengaruh positif signifikan dimana semakin tinggi pengeluaran perkapita kaum perempuan maka semakin tinggi pula tingkat serapan tenaga kerja perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi. Meningkatnya pengeluaran perkapita pada perempuan menunjukan semakin tinggi tingkat kesejahteraan secara ekonomi yang dirasakan oleh kaum perempuan. Sehingga tingginya kesejahteraan secara ekonomi yang dirasakan oleh kaum perempuan akan memberikan akses yang lebih besar pada pendidikan, dimana

semakin luasnya akses kaum perempuan pada pendidikan maka akan meningkatkan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan yang akan diikuti dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas tinggi. Sehingga meningkatnya pengeluaran perkapita pada kaum perempuan akan meningkatkan akses dalam kesempatan dalam memasuki pasar kerja sektor formal. Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari pengeluaran perkapita perempuan di Kabupaten Bangka masih sangat rendah, sehingga jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan perempuan di Kabupaten Bangka masih jauh dibandingkan dengan laki-laki.

## B. Tenaga Kerja

### 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Manfaat data angka partisipasi angkatan kerja (APAK) sebagai adalah untuk mengukur komposisi pasokan tenaga kerja di dalam perekonomian, memahami perilaku pasar tenaga kerja dari berbagai kategori populasi. Faktor-faktor yang mendasari tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara sosial maupun demografi serta ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Umur.

2. Status perkawinan.
3. Tingkat pendidikan
4. Daerah tempat tinggal
5. Pendapatan
6. Agama.

Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak penduduk usia kerja yang siap kerja (bukan penduduk usia kerja yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) maka nilai TPAK semakin tinggi. Oleh karena itu apabila tingkat partisipasi sekolah dari penduduk usia kerja semakin tinggi, maka nilai TPAK akan semakin rendah. Apabila semakin banyak wanita yang bekerja, maka nilai TPAK semakin tinggi. Namun, apabila semakin banyak wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah tangga daripada bekerja, maka nilai TPAK akan semakin turun.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah yang disarankan oleh The International Labour Organization (ILO) . Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang

dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur. Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu.

**Tabel 7.3**

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2023

NO	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total ( L+P)
		Laki-Laki	Perempuan	
	I . Angkatan Kerja			
1	Bekerja	108.780	55.609	164.389
2	Pengangguran Terbuka	3.362	5.346	8.708
	II. Bukan Angkatan Kerja	20.53	63.256	63.257
	<b>Jumlah</b>			

*Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*

**Tabel 7.4**

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2020 s.d 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42	5,97	5,39	5,03
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,93	62,68	68,81	67,46

*Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*

Berdasarkan tabel 7.4 diatas diketahui BPS menghitung TPAK berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kelamin untuk secara keseluruhan rasio TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Artinya, dari seluruh penduduk usia kerja (kelompok produktif), lebih banyak laki-laki yang menjadi angkatan kerja dan aktif secara ekonomi.

Hal ini tidak terlepas dari pembagian peran yang telah diyakini dan mengakar dimasyarakat secara turun temurun bahwa peran utama laki laki adalah bekerja di sektor publik (pencari nafkah), sedangkan peran utama perempuan adalah bekerja di sektor domestik (rumah tangga). Dengan demikian, rasio persentase TPAK perempuan yang lebih rendah dari laki-laki disebabkan adanya sejumlah perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga.

Dengan pilihan tersebut, otomatis kelompok ini akan menjadi bagian dari kelompok bukan angkatan

kerja karena alokasi waktunya lebih banyak atau seluruhnya digunakan untuk mengurus rumah tangga. Meski demikian, partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Bangka sudah sangat baik.

Adanya mayoritas penduduk usia produktif diharapkan dapat mendorong roda perekonomian di Kabupaten Bangka agar bergerak maksimal. Pola kecenderungan mengelompoknya angkatan kerja pada umur tertentu ini relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak terlalu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, secara gender, mayoritas angkatan kerja laki-laki dan perempuan sama-sama sudah memiliki pekerjaan atau karir yang cukup stabil dan berada di puncak produktivitas.

Oleh sebab itu, keduanya memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk berperan maksimal sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Bangka.

Angkatan kerja dalam jumlah yang banyak memang penting karena semakin banyak penduduk yang aktif dalam perekonomian wilayah. Namun kualitas angkatan kerja juga menjadi faktor yang sangat penting.

Angkatan kerja yang berkualitas tentu akan lebih terampil, sehingga lebih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam posisi-posisi pekerjaan yang strategis. Keterlibatan pada posisi strategis memberikan keuntungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan, berupa penghasilan yang lebih baik

atau tinggi.

Dampaknya adalah konsumsi rumah tangga tumbuh dengan baik sehingga ekonomi daerah juga bertumbuh. Oleh sebab itu, kualitas sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian yang serius. Salah satu ukuran untuk mendapatkan gambaran kualitas angkatan kerja yang dimiliki adalah dengan melihat tingkat pendidikan dari angkatan kerja yang bersangkutan.

**Tabel 7.5**

Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2023

Pendidikan Pencari Kerja	Pencari Kerja		Jumlah	Pendaftar yang Berpengalaman		Jumlah	Yang Belum diTempatkan		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SD/Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SLTP/Sederajat	0	1	1	1	0	1	0	1	1
SLTA/Sederajat	82	68	150	23	20	43	73	59	132
Diploma (D1/D2/D3)	35	44	79	11	10	21	35	44	79
SI/S2/S3	78	96	174	28	31	59	77	94	171
<b>Jumlah</b>	<b>195</b>	<b>209</b>	<b>404</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>124</b>	<b>185</b>	<b>198</b>	<b>383</b>

Sumber : Dinakerperindag Kab. Bangka Tahun 2023

Berdasarkan tabel 7.5 diketahui jumlah pencari kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka

sebanyak 383 orang. Dimana terlihat bahwa jumlah pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan yaitu 185 orang laki-laki dan 194 orang perempuan. Sedangkan dilihat dari pendidikan jumlah pencari kerja lebih banyak yaitu tamatan S1/S2/S3 sebanyak 171 orang.

## **2. Perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, dan teknisi**

Pemberdayaan perempuan merupakan alat agar perempuan menjadi lebih berkualitas. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang masih berada ditingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Selanjutnya meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi yang produktif dan juga untuk meningkatkan kemampuan kapasitas perempuan dalam kelembagaan.

Perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, dan teknisi berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan taraf hidup perempuan. Jika seorang perempuan mempunyai kedudukan strategis dalam pengambilan keputusan maka otomatis akan mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup perempuan secara umum. Bahkan daya ungkit hal ini merupakan daya ungkit yang paling besar dibandingkan faktor lainnya. Perempuan yang mengisi jabatan ini sebagian besar belatar pendidikan yang mumpuni serta memiliki

keahlian yang spesial. Perempuan dengan jabatan tersebut juga umumnya mempunyai pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan dibawahnya. Sehingga perempuan yang mengisi jabatan-jabatan pekerja sebagai manajer, professional,administrasi, dan teknisi menunjukkan perempuan yang berkualitas tinggi. Hal inilah yang mendorong meningkatnya IPM perempuan baik pada dimensi pendidikan maupun ekonomi (daya beli). Berikut adalah persentase tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi menurut jenis kelamin.

Tabel 7.6  
Jumlah Persentase Tenaga Manajer, Profesional,  
Admistrasi, Teknisi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten  
Bangka Tahun 2023

Wilayah	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Bangka	46,65	46,65	53,35	59,99

*Sumber data Badan Pusat Statistik 2023*

### **2.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan

penyelengaraan kesejahteraan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. Kriteria DTKS meliputi : kemiskinan; ketelantaran, kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; korban tindak kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi; dan/ atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

**Tabel 7.7**  
Rekapitulasi Data Terpadu  
Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menurut  
Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Anggota Rumah Tangga (ART)
1	Sungailiat	10.075	27.213
2	Merawang	2.995	7.929
3	Mendo Barat	6.363	19.502
4	Bakam	2.875	8.025
5	Puding Besar	2.914	8.405
6	Pemali	2.704	6.675
7	Riau Silip	3.459	8.975
8	Belinyu	6.214	16.594
<b>Jumlah</b>		<b>37.599</b>	<b>103.318</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Bangka Tahun 2023*

### **3.Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 7.8**

Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	Tuna Netra		Tuna Rungu Wicara		Tuna Grahita		Tuna Daksa		Dwonsindrom		Autis		JUMLAH L + P
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	1	2	17	21	81	39	9	5	5	10	29	3	222

Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2024

Data UPTD SLB Kabupaten Bangka tahun 2024 mencatat ada 222 orang penyandang disabilitas. Jenis disabilitas yang terdapat pada Kabupaten Bangka adalah tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna daksa, downsyndrom, dan autis. Yang paling banyak penyandang disabilitas adalah tuna grahita dengan jumlah 130 orang yang terdiri dari laki laki sebanyak 81 orang dan Perempuan sebanyak 39orang.

Tuna grahita adalah sebutan bagi orang orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penyandang tuna grahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak sehat pada umumnya. Tidak hanya itu, mereka juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan untuk menjalani kegiatan sehari-hari secara normal.

### C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bagian penting perekonomian. Pada dasarnya, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor ekonomi, istilah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) bukanlah suatu istilah yang asing didengar. Namun tidak

banyak yang mengetahui perbedaan dari kedua istilah tersebut. Perbedaan mendasar dari dua istilah tersebut terletak pada jenis kegiatannya. UKM atau UMKM merupakan jenis usaha yang bertujuan untuk menjual kembali barang yang diproduksi oleh IKM atau bergerak pada penjualan jasa. Contoh konkrit dari UKM atau UMKM ini adalah toko kelontong, warung, jasa servis elektronik, jasa *laundry*, dan sebagainya. Sementara IKM adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, IKM lebih berkaitan dengan proses produksi barang, sedangkan UKM atau UMKM lebih berkaitan dengan proses pemasaran dari produk barang/jasa tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan suatu usaha menjadi UKM/UMKM dan IKM sekaligus, ketika usaha tersebut bergerak dari proses produksi hingga pemasaran. UKM/UMKM terdiri atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

**Tabel 7.9**

Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar di Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Jenis Indutri/Usaha	Jumlah
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1
2	Industri Pengolahan	0
3	Perdagangan Besar dan Eceran, Repalasi Mobil dan Sepeda motor	1
4	Pertambangan dan Penggalian	0
5	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0

6	Pertanian, Kehutanan, Pertenakan, Perikanan	0
7	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0
8	Transportasi dan Pergudangan	1
9	Konstruksi	0
10	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	43
11	Informasi dan Komunikasi	0
12	Jasa Pendidikan	0
13	Jasa lainnya	13
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>

Sumber : DINPMP2KUKM Kab. Bangka Tahun 2023

#### D. Koperasi dan Keanggotaan Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi merupakan soko guru ekonomi Indonesia. Pemerintah juga meyakini bahwa Small Medium Entreprise (SME) dan Koperasi merupakan tulang punggung bagi kegiatan perekonomian yang positif. Karena ketika perekonomian dan industri negara maju mengalami kontraksi, justru negara-negara yang menyupport perekonomian mikro dan koperasi mampu bertahan dari goncangan global dengan baik.

Di Kabupaten Bangka secara kuantitatif perkembangan koperasi menunjukan peningkatan dari

tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 jumlah koperasi di kabupaten Bangka sebanyak 211 unit yang meliputi koperasi non KUD sejumlah 203 unit dan KUD sebanyak 8 unit dengan jumlah anggota sebanyak 13.382 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah koperasi di Kabupaten Bangka sebanyak 210 unit yang terdiri dari koperasi non KUD sejumlah 202 unit dan KUD sebanyak 8 unit dengan jumlah anggota sebanyak 13.160 orang. Sejalan dengan bertambahnya jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi juga bertambah dari tahun sebelumnya. Mengenai jumlah Koperasi dan Keanggotan Koperasi di Kabupaten Bangka pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 8.13 berikut

**Tabel 7.12**

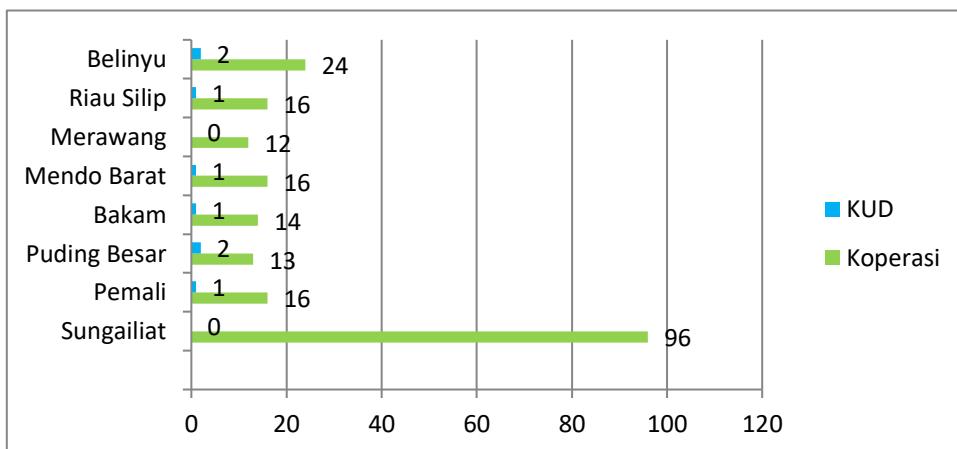
Jumlah Koperasi, KUD dan Anggota Koperasi Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Kecamatan	Koperasi	KUD	Jumlah	Anggota		
					L	P	JML
1	Sungailiat	96	0	96	2.043	1227	3.366
2	Pemali	16	1	17	2.043	1227	3.288
3	Puding Besar	13	2	15	2.043	1227	3.287
4	Bakam	14	1	15	2.043	1227	3.286
5	Mendo Barat	16	1	17	2.043	1227	3.288
6	Merawang	12	0	12	2.043	1227	3.282
7	Riau Silip	16	1	17	2.043	1227	3.288
8	Belinyu	24	2	26	2.043	1227	3.298
<b>Jumlah</b>		<b>207</b>	<b>8</b>	<b>215</b>	<b>16.344</b>	9816	26.383

Sumber : DINPMP2KUKM Kab. Bangka Tahun 2023

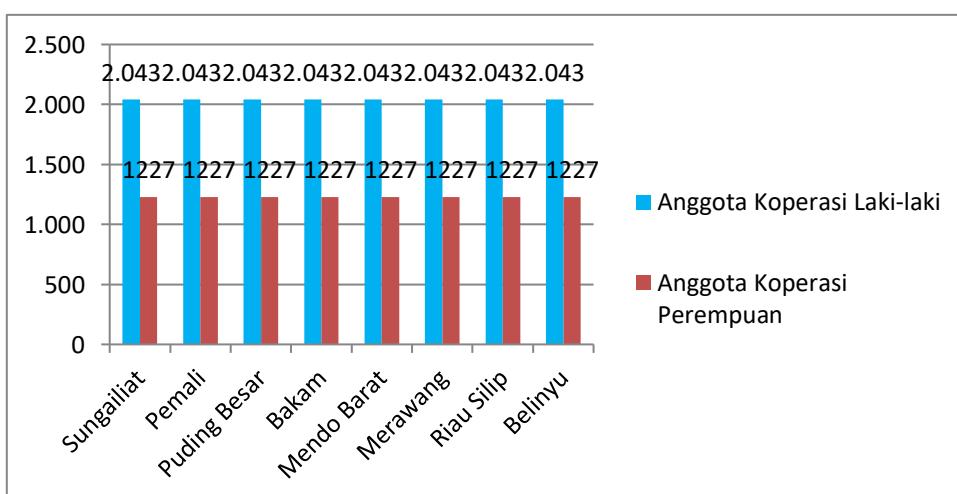
**Grafik 7.2**

Jumlah Koperasi, KUD Di Kabupaten Bangka Tahun 2023



**Grafik 7.3**

Grafik data Anggota Koperasi berdasarkan jenis kelamin



Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah anggota koperasi perempuan sebanyak 13.382 orang. Kecamatan yang anggota koperasinya lebih banyak adalah kecamatan Belinyu sebanyak 3.445 orang sedangkan yang lebih sedikit kecamatan merawang sebanyak 242 orang.

# BAB VIII



## **BAB VIII**

### **GENDER BIDANG KESEHATAN**

Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup penduduk dan generasi penerus. Kondisi kesehatan dan status gizi merupakan elemen pokok dari mata rantai terciptanya SDM yang berkualitas. Perempuan secara kodrati memiliki fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang merupakan suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak yang dikandungnya. Untuk itu perempuan seharusnya memiliki hak menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, pemerintah selalu berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perempuan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana. Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia seseorang adalah Kesehatan. Orang yang sehat akan mampu melakukan segala kegiatan sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. Oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan bertujuan guna memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat.

Harga dari kesehatan tidak dapat dikonversi kedalam mata uang apapun. Orang rela untuk menggelontorkan banyak uang untuk memelihara kesehatan mereka, apalagi disaat sudah sakit pastinya mereka berani membayar berapapun untuk kesembuhan dari sakit mereka. Kesehatan merupakan faktor yang penting dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan

generasi penerus. Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui, suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak yang dikandungnya. Peningkatan kesehatan perempuan merupakan bagian dari Pembangunan Millenium (MDGs). Ada tiga tujuan pembangunan yang terkait langsung dengan kesehatan perempuan, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kematian anak, dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan keluarga berencana. Pembangunan di bidang kesehatan menjadi salah satu isu prioritas Kabupaten Bangka dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap kesehatan terus ditingkatkan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah

dilaksanakan. Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karena dari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat ataukah belum dan apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan.

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat dan tenram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sehubungan dengan itu, maka penyajian data kesehatan dengan perspektif gender merupakan salah satu cara untuk dapat mengingatkan kita dan para pemangku kebijakan agar senantiasa memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap persoalan persoalan kesehatan perempuan dan anak.

#### A. Sarana Prasarana

Upaya pemerintah dalam memeratakan pelayanan kesehatan pada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas serta fasilitas air bersih. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan di bidang kesehatan bertujuan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang mana nantinya juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan yang lebih utama yakni

menurunkan angka kematian bayi/balita. Program kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupan serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat.

Sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana di suatu fasilitas pelayanan kesehatan menjadi pendukung tercapainya derajat Kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, satu hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah adanya kemudahan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memadai oleh masyarakat. Kemudahan akses ke pelayanan kesehatan meliputi kemudahan menjangkau fasilitas kesehatan, kesamaan mendapatkan pelayanan oleh petugas kesehatan tanpa membeda-bedakan status sosial, meratanya petugas kesehatan baik itu dokter, bidan atau petugas medis lainnya.

**Tabel 8.1**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2024**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	6
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Puskesmas	12
4	Puskesmas Pembantu	38
5	Puskesmas Keliling	0
6	Posyandu	236

7	Poskesdes	79
8	Praktek Dokter	21
9	Praktek Bidan	15
10	Poliklinik	9
11	Apotek	47
	<b>Jumlah</b>	<b>463</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2024

Pada Tabel 8.1 nampak bahwa fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu, poskesdes, puskesmas pembantu. Banyaknya fasilitas kesehatan ini mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bangka dan penduduk yang menyebar di 8 kecamatan kota. Karena itu posyandu, poskesdes, puskesmas pembantu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat bagi masyarakat serta kondisi tempat tinggal penduduk yang tersebar di daerah sehingga masyarakat lebih memilih ke pelayanan kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan hanya akan berfungsi optimal bila di tunjang oleh petugas kesehatan dan tenaga medis seperti yang ditampilkan pada tabel 8.2 berikut:

**Tabel 8.2**

Jumlah dan Persentase Tenaga Medis dan Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS			DOKTER			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. PUSKESMAS RAWAT INAP</b>																			
1	PETALING	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	PENAGAN	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	BAKAM	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BELINYU	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	RIAU SILIP	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
<b>PUSKESMAS NON RAWAT INAP</b>																			
6	BATURUSA	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7	PUDING BESAR	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	SUNGAI LIAT	0	0	0	2	2	4	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0
9	KENANGA	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
10	SINAR BARU	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11	PEMALI	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
12	GUNUNG MUDA	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>SUB JUMLAH PUSKESMAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. RUMAH SAKIT DI KAB.BANGKA</b>																			

1	RSUD DEPATI BAHRIN	19	17	36	7	9	16	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	0
2	RS JIWA	2	4	6	1	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
3	SUNGAILIAT																			
4	RS MEDIKA																			
5	STANIA	6	1	7	5	1	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	RS PROPINSI DR. IR. H. SOEKARNO	18	14	32	4	13	17	0	0	0	0	2	2	1	2	3	0	0	0	0
7	RSUD DR. EKO																			
8	MAULANA ALI	5	0	5	2	3	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	RSUD SYAFRIE																			
10	RACHMAN	0	1	1	3	2	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	RS ARSANI	3	3	6	1	4	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUB JUMLAH RUMAH SAKIT</b>		<b>53</b>	<b>40</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. KLINIK DI KAB.BANGKA</b>																				
1	KLINIK 2M DE. ZARRIL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	KLINIK PRATAMA																			
3	BNNK BANGKA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KLINIK CANDI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KLINIK ANUGERAH																			
6	MEDISTA																			
7	KENANGA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KLINIK MEDIKA																			
9	STANNIA																			
10	BELINYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0



21	KLINIK GUNUNG MARAS LESTARI	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUB JUMLAH KLINIK	1	0	1	9	3	11	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0
	DINAS KESEHATAN KAB.BANGKA																			
1	DINKES KABUPATEN BANGKA PSC 119 SEPINTU SEDULANG KAB. BANGKA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH (KAB/KOTA) <sup>a</sup>	0	40	94	39	64	102	0	0	0	7	12	19	3	5	9	1	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2024

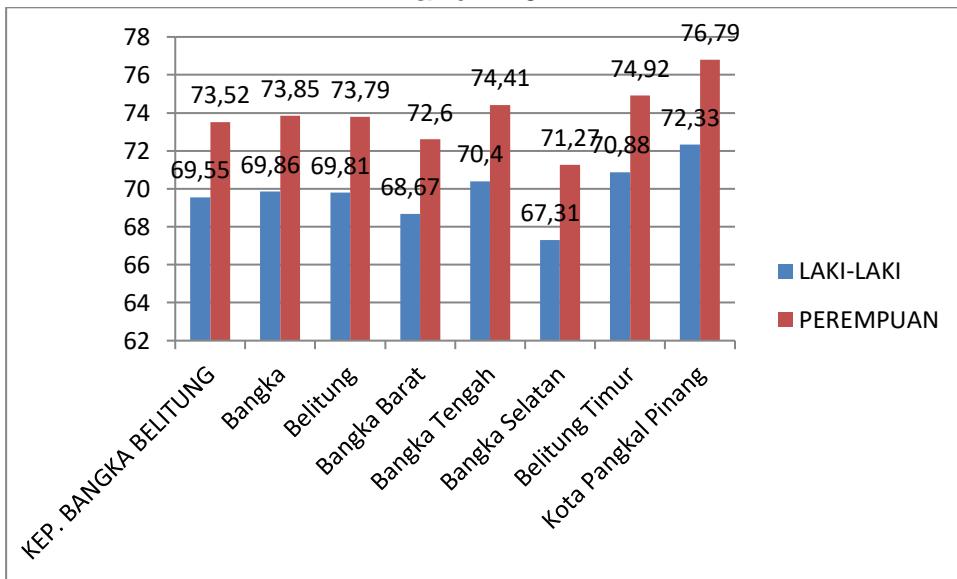
Pada tabel 8.2 terlihat jumlah tenaga medis dan kesehatan laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan.

## B. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data Angka Harapan Hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Data Angka Harapan Hidup berdasar angka statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup suatu wilayah, menandakan semakin tinggi pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

**Grafik 8.1**  
**Angka/Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Dari Tahun 2024**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun 2024*

Gambar diatas memperlihatkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Bangka Perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

### C. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

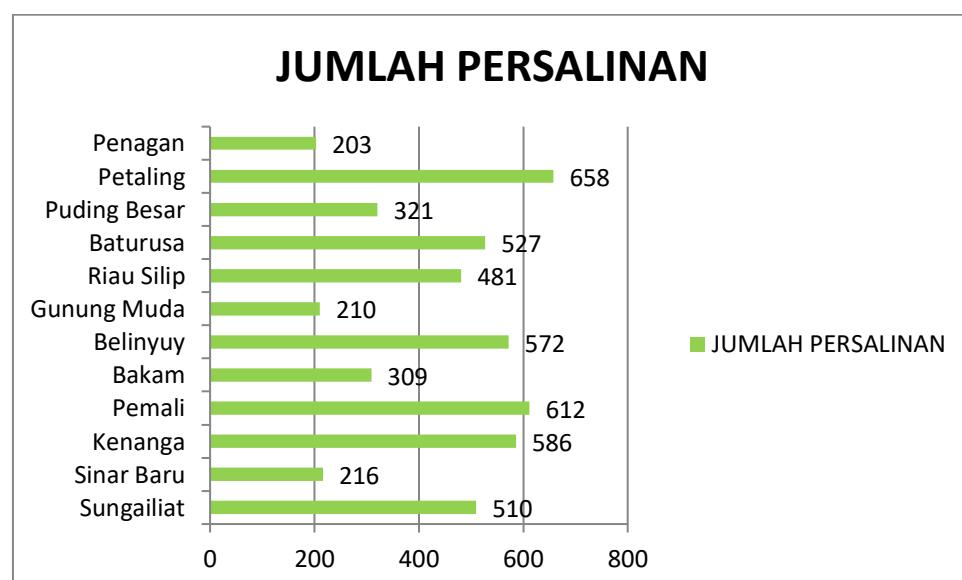
Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain

pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan.

Tenaga kesehatan atau medis merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil yang sudah sesuai standar seperti bidan, dokter, tenaga paramedis yang ada dalam fasilitas kesehatan hal tersebut dilakukan agar persalinan bisa aman dan selamat sehingga bayi bisa lahir sehat dan selamat.

### Grafik 8.2

Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan Di Kabupaten Bangka Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya proses persalinan. Dimana dari 5.138 jumlah ibu hamil yang persalinannya sudah banyak ditangani oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 5.138 sedangkan untuk bukan tenaga kesehatan atau dukun sebesar 0.

#### **D. Kunjungan / Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( K1/K4)**

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja.

Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan,

dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan.

Cakupan kunjungan/pelayanan ibu hamil (K1 dan K4) di kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 8.5 dibawah ini.

**Tabel 8.5**

Cakupan Kunjungan/Pelayanan Ibu Hamil (K1/K4) Di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	JUMLAH	K1		K4	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Sungailiat	535	544	5,4	463	4,6
2	Sinar Baru	226	182	1,8	198	2,0
3	Kenanga	615	469	4,7	415	4,2
4	Pemali	640	483	4,8	426	4,3
5	Bakam	324	309	3,1	305	3,1
6	Belinyu	598	572	5,7	568	5,7
7	Gunung Muda	220	152	1,5	102	1,0
8	Riau Silip	504	436	4,4	391	3,9
9	Baturusa	553	559	5,6	557	5,6
10	Puding Besar	335	321	3,2	299	3,0
11	Petaling	699	684	6,8	682	6,8
12	Penagan	207	204	2,0	180	1,8
JUMLAH		5.456	4.915	90,1	4.586	84,1

Pada tabel 8.5 diatas dapat dilihat bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya secara dini ke dokter sudah cukup tinggi dimana jumlah kunjungan K1 pada tahun 2024 sebanyak 5.456 kunjungan. Jumlah kunjungan K1 yang paling banyak ada pada Puskesmas Petaling sebanyak 684 kunjungan. dan paling sedikit ada di

Puskesmas Sinar Baru sebanyak 182 kunjungan.

#### E. Angka Kematian Ibu (AKI)

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak mendapat perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Menurut WHO, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu sebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insidensif) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) diperhitungkan pula dalam jangka waktu 6 minggu sehingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. Angka Kematian Ibu (AKI) dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu yang terbanyak adalah: pendarahan, hipertensi pada kehamilan, partus macet, infeksi dan komplikasi aborsi. Persalinan dirumah dan ditolong oleh dukun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada dasarnya kematian ibu melahirkan akibat

dari faktor utama tersebut dapat dicegah atau dikurangi dengan pemeriksaan rutin ketenaga medis pada saat kehamilan atau menjelang kelahiran. Selain itu tidak cepatnya penanganan proses melahirkan, terutama jika ada faktor penyulit menjadi hal yang menyebabkan ibu melahirkan tidak terselamatkan nyawanya. Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dengan menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi serta akses terhadap keluarga berencana. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bangka 2023 dapat dilihat pada tabel 8.6 dibawah ini .

**Tabel 8.6**  
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bangka Tahun  
2024

PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU			
		JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
3	4	5	6	7	8
SUNGAILIAT	458	0	0	0	0
SINAR BARU	192	1	0	0	1
KENANGA	431	1	0	0	1
PEMALI	401	0	0	0	0

BAKAM	294	0	0	0	0
BELINYU	562	0	0	0	0
GUNUNG MUDA	161	0	0	0	0
RIAU SILIP	427	0	0	0	0
BATURUSA	521	0	0	0	0
PUDING BESAR	325	1	1	1	3
PETALING	648	1	0	0	1
PENAGAN	182	0	0	0	0

Pada tabel 8.6 diatas dapat dilihat bahwa tercatat selama tahun 2024 terjadi kematian ibu sebanyak 6 kasus. Jika dilihat jumlah kematian ibu pada tahun 2024 kematian ibu hamil terbanyak yaitu sebanyak 4 orang.

#### F. Penyebab Kematian Ibu (AKI)

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul, yakni hipertensi, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Namun ternyata masih ada faktor lain yang cukup penting namun sering terabaikan oleh ibu melahirkan. Jumlah Kematian Ibu menurut penyebabnya di Kabupaten Bangka 2022 dapat dilihat pada tabel 8.7 dibawah ini.

**Tabel 8.7**  
**Penyebab Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bangka Tahun  
2024**

Puskesmas	Perdarahan	Gangguan Hipertensi	Infeksi	Kelainan Jantung Dan Pembuluh Dara h*	Gangguan Autoimun**	Gangguan Cerebrovaskular***	Covid-19	Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus)	Lain-Lain
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sungailiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinar baru	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Kenanga	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bakam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belinyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gunung muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riau silip	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baturusa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puding besar	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Petaling	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Penagan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada tabel 8.7 diatas dapat dilihat bahwa tercatat selama tahun 2024 terjadi kematian ibu karena penyebabnya seperti ganguan hipertensi dan lain-lain sebanyak 3 kasus.

#### **G. Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) Pada Ibu Hamil**

Tablet zat besi (Fe) merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Tablet zat besi (Fe) sangat

dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengkonsumsi Tablet zat besi (Fe) minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya.

Tablet Zat Besi (Fe) adalah suatu tablet vitamin dan mineral yang sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kecacatan pada perkembangan bayi baru lahir dan kematian ibu yang disebabkan oleh anemia berat. Tablet ini sangat diperlukan oleh ibu hamil. Manfaat Tablet Zat Besi (Fe) pada ibu hamil, diantaranya yaitu mencegah terjadinya anemia defisiensi besi, mencegah terjadinya pendarahan pada saat persalinan, dapat meningkatkan asupan nutrisi bagi janin, serta anemia dan pendarahan dapat dicegah sehingga kematian ibu pun dapat diturunkan. Data mengenai pemberian zat besi (Fe) pada ibu hamil dapat dilihat pada tabel 8.8 berikut :

**Tabel 8.8**

Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Zat Besi (Fe)  
di Kabupaten Bangka Tahun 2024

PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)			
		IBU HAMIL YANG MENDA PATKAN	%	IBU HAMIL YANG MENGONS UMSI	%
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Sungailiat	535	459	4,6	459	4,6
Sinar Baru	226	198	2,0	198	2,0
Kenanga	615	415	4,2	415	4,2
Pemali	640	426	4,3	426	4,3
Bakam	324	305	3,1	305	3,1
Belinyu	598	568	5,7	568	5,7
Gunung Muda	220	102	1,0	102	1,0
Riau Silip	504	403	4,0	403	4,0

Baturusa	553	557	5,6	557	5,6
Puding Besar	335	299	3,0	299	3,0
Petaling	699	680	6,8	680	6,8
Penagan	207	183	1,8	183	1,8

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2024*

Dari data diatas tercatat jumlah ibu hamil di Kabupaten Bangka yang mendapat tabel Zat Besi (Fe) pada tahun 2024 sebanyak 4.495 orang. Dimana Puskesmas Petaling merupakan Puskesmas dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan zat besi tertinggi yaitu sebesar 680 orang atau sebesar 6,8% dan Adapun Puskesmas yang jumlah ibu hamil yang mendapatkan zat besi paling sedikit adalah Puskesmas Gunung Muda hanya sebesar 102 orang atau sebesar 1 %.

#### **H. Partisipasi Ber KB**

Pada tahun 2024, Kabupaten Bangka mencapai tingkat partisipasi program Keluarga Berencana (KB) tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan indikator sebesar 2,4 persen.

Pemerintah Kabupaten Bangka telah berupaya meningkatkan partisipasi KB melalui berbagai program dan inisiatif, termasuk pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di beberapa desa dan kelurahan.

Selain itu, pemerintah daerah juga aktif dalam mengadakan audit kasus stunting untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, yang berkaitan erat dengan program KB.

Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program KB.

NO	PUSKESMAS	JUMLAH PUS	PESERTA KB AKTIF METODE MODERN															
			KON DOM	%	SUN TIK	%	PIL	%	AKD R	%	MOP	%	MOW	%	IMP LAN	%	MAL	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sungailiat	6780	199	2,0	4866	48,7	1.082	10,8	154	1,5	8	0,0	112	1,1	889	8,9	0	0,0
2	Sinar Baru	2420	34	0,3	1774	17,7	187	1,9	39	0,4	0	0,0	11	0,1	108	1,1	4	0,0
3	Kenanga	7023	106	1,1	3481	34,8	1.377	13,8	179	1,8	9	0,0	283	2,8	590	5,9	0	0,0
4	Pemali	6024	76	0,8	2740	27,4	817	8,2	104	1,0	4	0,0	115	1,2	614	6,1	11	0,0
5	Bakam	3267	56	0,6	1603	16,0	906	9,1	89	0,9	3	0,0	78	0,8	89	0,9	3	0,0
6	Belinyu	6520	24	0,2	3753	37,5	1.347	13,5	162	1,6	5	0,0	131	1,3	337	3,4	8	0,0
7	Gunung Muda	2147	30	0,3	801	8,0	416	4,2	92	0,9	2	0,0	58	0,6	262	2,6	9	0,0
8	Riau Silip	4935	59	0,6	2116	21,2	1.136	11,4	101	1,0	9	0,0	126	1,3	272	2,7	52	0,0
9	Baturusa	5308	159	1,6	2438	24,4	1.718	17,2	170	1,7	7	0,0	157	1,6	614	6,1	2	0,0
10	Puding Besar	3432	200	2,0	500	5,0	403	4,0	190	1,9	30	0,0	38	0,4	283	2,8	3	0,0
11	Petaling	6839	108	1,1	3488	34,9	928	9,3	127	1,3	4	0,0	224	2,2	333	3,3	0	0,0
12	Penagan	1914	22	0,2	1130	11,3	113	1,1	29	0,3	1	0,0	59	0,6	105	1,1	3	0,0
<b>JUMLAH (KAB/KOTA)</b>		###	1.073	2,2	27.815	0,1	11.136	0,0	1.436	3,0	82	0,2	1.392	2,9	4.496	9,4	95	0,2



# BAB IX



## **BAB IX**

### **POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN**

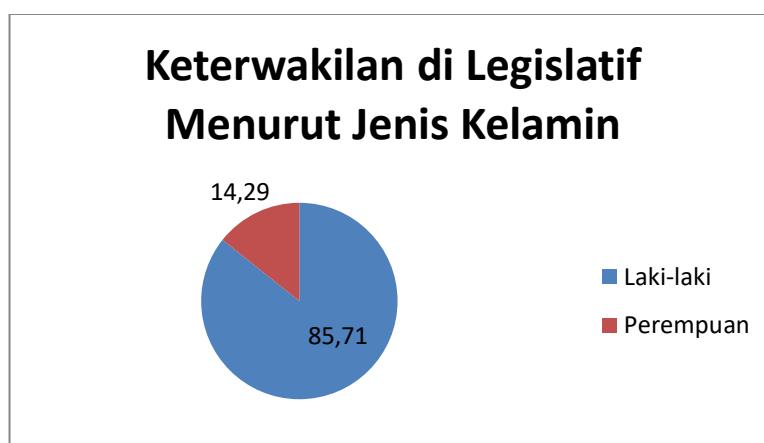
#### **A. Keterwakilan Perempuan Pada Bidang Legislatif.**

Meski sudah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, angka keterwakilan perempuan dalam politik masih belum mencapai *critical mass* atau jumlah minimal yang diperlukan untuk menciptakan perubahan, yaitu rata-rata kuota 30 persen. Padahal 49,42 persen penduduk Indonesia adalah perempuan dan sekitar 54 persennya berusia produktif. "Berdasarkan data tersebut, seharusnya perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga perempuan harus terdidik, berdaya, dan setara kedudukannya agar dapat berkarya dalam berbagai bidang untuk memberikan banyak manfaat bagi pembangunan. Perempuan tidak hanya menjadi objek dari berbagai program pembangunan, tetapi justru menjadi subjek pembangunan. Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, namun sebagai aktor utama dalam membangun negara dan bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di Kabupaten Bangka kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Pada tabel 9.1 ditunjukkan jumlah Anggota DPRD berdasarkan fraksi dan jenis kelamin sebagai berikut :

**Grafik 9.1**

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bangka Menurut Jenis Kelamin Periode 2024



*Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2024*

Grafik 9.1 di atas menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik sebanyak 14,29% lebih rendah dari laki-laki sebanyak 85,71%.

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya rendahnya kemauan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam berpolitik, Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik menjadi salah satu faktor penyebab minimnya keterlibatan perempuan, disamping itu budaya

masyarakat setempat masih mempercayakan kepada laki-laki untuk memimpin. Padahal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

### **B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif.**

Perempuan Indonesia sudah dikenal sejak lama sebagai pekerja keras dan turut menyumbang pembangunan nasional dan rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif perempuan. Namun kenyataannya, perempuan belum dilibatkan secara maksimal dari berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan baik dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi- posisi pengambilan keputusan di sektor publik dapat berujung pada pembangunan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum laki-laki, serta investasi sumbersumber daya nasional dengan pertimbangan keuntungan bagi kaum laki-laki. Berdasarkan atas hal tersebut maka dirasakan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dengan meningkatkan kuantitas perempuan dalam lembaga pemerintahan (Eksekutif).

### **C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan dan Jenis Kelamin.**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi kepemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya

pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut.

Saat ini, di Kabupaten Bangka terdapat sebanyak 3.636 orang PNS. Dari 3.636 jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bangka terdapat 2.253 perempuan atau 61,96 % dan 1.383 orang laki-laki atau 38,03 %. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di Kabupaten Bangka.

Pada tabel 9.1 ditunjukkan jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 9.1**

Jumlah PNS Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin Di Kabupaten Bangka Tahun 2024

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I			
I/A	0		0
I/B	0		0
I/C	2		2
1/D	1	3	4
Golongan II			
II/A	10	2	12
II/B	19	6	25
III/C	24	21	45
1V/D	100	109	209
Golongan III			
III/A	190	254	444
III/B	175	334	509
III/C	221	545	766
1II/D	282	513	795
Golongan IV			
IV/A	104	113	217
IV/B	64	85	149

IV/C	29	38	67
IV/D	0	0	0
IV/E	0	0	0
Keseluruhan	1221	2023	3244

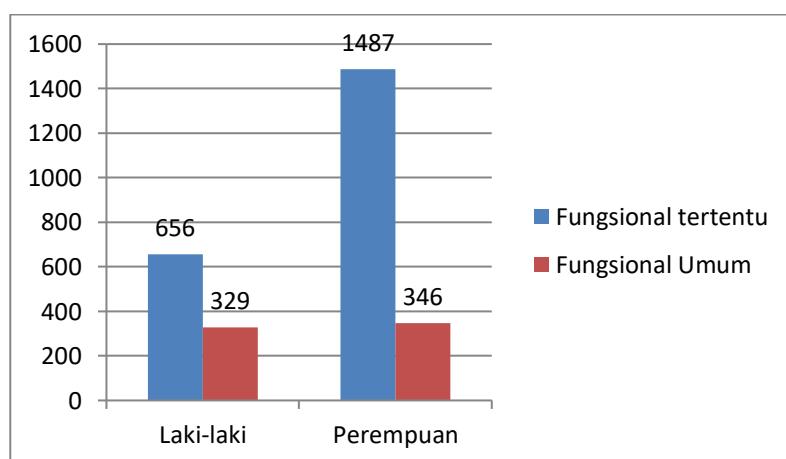
Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2024

Pada Tabel diatas terlihat potensi PNS perempuan lebih tinggi dari PNS laki-laki dimana pada Golongan IIIc sebanyak 545 orang.

#### D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan/Eselon dan Jenis Kelamin

Pada tahun 2024 PNS yang menduduki jabatan eselon di Kabupaten Bangka berjumlah 449 orang. Dari 449 jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon terdapat 191 perempuan atau 42,53 % dan 258 orang laki- laki atau 57,46 %. Dari jumlah tersebut hanya 7 orang yang menduduki eselon II sebagai pengambil kebijakan, dimana laki-laki lebih dominan yaitu 24 orang, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kabupaten Bangka lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

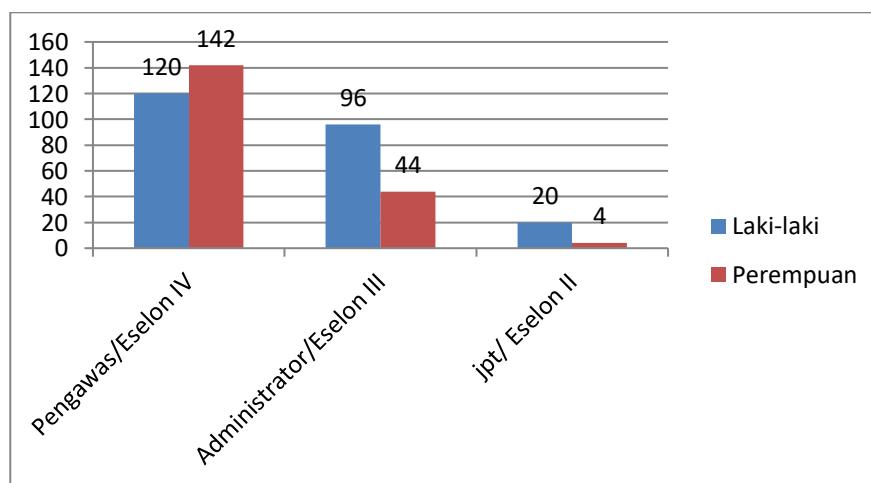
Grafik 9.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2024

Dari tabel 9.2 di atas terlihat bahwa berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, jumlah PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka mencapai 3.636 orang yang terdiri dari 1.383 orang PNS laki-laki (38,03 %) dan 2.253 orang PNS perempuan (61,96 %). PNS perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah PNS laki- laki. Jumlah ini didominasi oleh jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu seperti Tenaga Pendidik/ Guru dan Tenaga Kesehatan seperti Bidan dan Perawat. Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

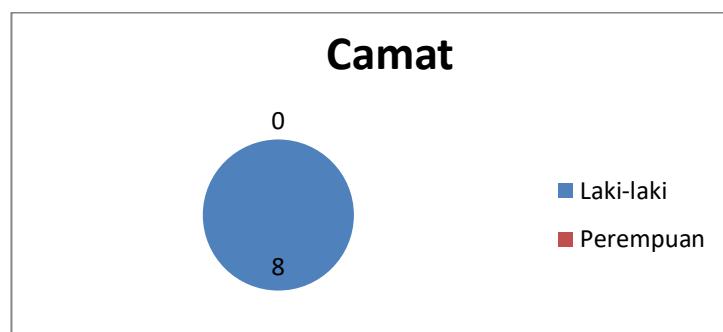
**Grafik 9.3**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2024



## E. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota. Camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Di Kabupaten Bangka terdapat delapan kecamatan, yakni Kecamatan Sungailiat, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Pemali, Riau Silip, dan Kecamatan Belinyu. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk delapan kecamatan tersebut semuanya dipimpin oleh camat laki-laki. Pada tabel 9.4 ditunjukkan jumlah camat berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 9.4**  
Jumlah Camat tahun 2024



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2022

Sebagaimana di lihat dari tabel diatas, maka akan terlihat bias gender karena menggambarkan jabatan-jabatan strategis di dominasi oleh laki-laki.

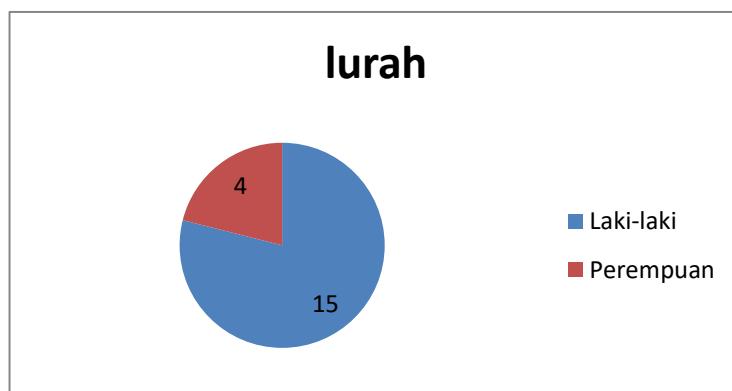
Sehingga persentase perempuan sangat kurang untuk menduduki jabatan tersebut .

## F. Lurah

Di Kabupaten Bangka terdapat 19 kelurahan dari dua kecamatan. Pada tabel 9.5 ditunjukkan jumlah lurah berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 9.5**

Jumlah Lurah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024



*Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2024*

Dari data diatas tergambar bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (Kelurahan) di Kabupaten Bangka masih di dominasi oleh laki- laki yaitu 84,21% atau 16 orang dan lurah perempuan 3 orang atau sebesar 15,78%. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kabupaten Bangka didominasi oleh laki-laki daripada perempuan.

## **G. Pejabat dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Menurut Jenis Kelamin**

Teori Trias Politika, meletakan fungsi-fungsi lembaga Negara sebagai sistem check and balances. Peran lembaga yudikatif dalam check and balances itu sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Indonesia mempunyai beberapa lingkungan dan tingkatan. Lingkungan peradilan terdiri dari empat peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer yang semuanya berujung pada satu institusi, Mahkamah Agung (MA).

Peraturan mengenai Peradilan di Indonesia belum mengatur keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan dalam lingkungan itu. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimanakah posisi perempuan dalam jabatan tersebut. Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu lembaga yudikatif adalah kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan di Kejaksaan seperti pada tabel 9.6 berikut:

**Tabel 9.2**  
**Jumlah Pejabat dan Pegawai Tata Usaha Menurut Jenis  
 Kelamin Tahun 2023**

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
<b>Struktural</b>			
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Bangka		1
2.	Kepala Sub Bag Pembinaan	1	
3.	Kepala Seksi Inteligen	1	
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	1	
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	1	
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	1	
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	1	
8.	Kepala Urusan Perelengkapan	1	
9.	Kepala Seksi Teknologi, Informasi, produksi intelijen, dan Penerangan Hukum	1	
10.	Kepala Seksi Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian		1
11.	Kepala Urusan Keuangan PNBP		1
12.	Kepala Seksi Daskrimti dan Perpustakaan		1
13.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan		1
14.	Kepala Sub Seksi Perdata		1
15.	Kepala Sub Seksi Barang Bukti		1
16.	Pegawai/Staf	39	35
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>42</b>

Pejabat dan Pegawai Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tahun 2022 berjumlah 89 orang yang terdiri dari laki-laki 47 orang dan perempuan 42 orang. Pejabat struktural terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 6 orang. Keterlibatan perempuan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka berjumlah

sebanyak 42 orang (47,19%) dari keseluruhan Pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka.

**Tabel 9.3**

Jumlah Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Jaksa	7	7	14
2.	Fungsional Jaksa	1	5	6
	Jumlah	8	12	20

Berdasarkan data diatas, Jaksa yang memangku Jabatan Fungsional dan Struktural di Kabupaten Bangka ada 20 orang, yang terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 12 orang. Untuk Jabatan Fungsional Jaksa perempuan ada 5 orang, jadi keterwakilan perempuan jaksa menurut profesi kalau dipresentasekan 0.83% dari keseluruhan jaksa fungsional yang ada. Tabel diatas memperlihatkan bahwa Jaksa perempuan sudah hampir mendapat posisi yang sama dengan laki-laki.

#### **H. Hakim dan Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

**Tabel 9.4**

Jumlah Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1

3.	Hakim	5
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panmud Pidana	1
7.	Panmud Perdata	1
8.	Panmud Hukum	1
9.	Kasubbag Umum dan Keuangan	1
10.	Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	1
11.	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	1
12.	Pranata Keuangan APBN	1
13.	Panitera Pengganti	6
14.	Jurusita	3
15.	Jurusita Pengganti	3
16.	Analisis Perkara Peradilan	2
17.	Pengadministrasi Hukum	1
18.	Analis SDM Aparatur	1
19.	Pengelola Sistem dan Jaringan	2
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

Berdasarkan data diatas, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Negeri di Kabupaten Bangka Tahun 2022 berjumlah 34 orang. Hakim yang memangku Jabatan di Kabupaten Bangka ada 5 orang.

## I. Jumlah Personil TNI dan Polri Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Sebagaimana di legislatif, maka di bidang yudikatif juga akan dilihat komposisi gendernya. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi gender di TNI dan Polri yang menggambarkan dominasi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang menganggap bidang ini lebih cocok untuk laki-laki. Sehingga persentase perempuan sangat kurang.

Padahal Tugas Polisi wanita (polwan) di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi prianya.

**Tabel 9.5**

Jumlah Personil POLRI Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2023

<b>Jenis Golongan/Kepangkatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
AKBP	1	0	1
Komisaris Polisi	1	0	1
Ajun Komisaris Polisi (AKP)	9	0	9
IPTU	12	2	14
IPDA	15	2	17
AIPTU	25	0	25
AIPDA	82	3	85
Bripka	133	7	140
Brigadir	56	4	60
Briptu	95	8	103
Bripda	51	1	52
<b>Jumlah</b>	<b>480</b>	<b>27</b>	<b>507</b>

*Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2023*

**Tabel 9.6**  
 Jumlah Personil TNI Menurut Kepangkatan dan  
 Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2023

<b>Jenis Golongan/Kepangkatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
I. Perwira Menengah			
a. Mayor	0	0	0
II. Perwira Pertama			
a. Kapten	3	0	3
b. Letnan Satu	0	0	0
c. Letnan Dua	0	0	0
III. Bintara Tinggi			
a. Pembantu Letnan Satu	5	0	5
b. Pembantu Letnan Dua	4	0	4
III. Bintara			
a. Sersan Mayor	7	0	7
b. Sersan Kepala	7	0	7
c. Sersan Satu	25	0	25
d. Sersan Dua	17	0	17
<b>Jenis Golongan/Kepangkatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
IV. Tantama			
a. Kopral Kepala	0	0	0
b. Kopral Satu	3	0	3
c. Kopral Dua	2	0	2
	0	0	0

d. Prata	4	0	4
e. Pratu	7	0	7
f. Prada			
<b>V. PNS</b>			
a. Gol II C	0	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>85</b>

*Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2022*

Bila dilihat dari data di atas tergambar bahwa perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena kepengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

Partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Bangka menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bangka meningkat dari 8% pada tahun 2023 menjadi 16% pada tahun 2024.

Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mencakup Kabupaten Bangka, mengalami penurunan dari 0,497 pada tahun 2022 menjadi 0,490 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai dimensi, termasuk kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menerbitkan "Profil Gender dan Anak 2023" yang memuat data dan statistik terkait isu gender di wilayah tersebut. Dokumen ini dapat diakses melalui situs resmi pemerintah Kabupaten Bangka.

Meskipun terdapat kemajuan, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan politik di Kabupaten Bangka perlu terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan dalam partisipasi politik perempuan dan penurunan ketimpangan gender, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di Kabupaten Bangka.

# BAB X



DP2KBP3A  
Kabupaten Bangka

## **BAB X**

### **GAMBARAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN BANGKA**

Anak adalah penduduk yang berusia sebelum genap 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Namun untuk mengukur jumlah anak tentu akan kesulitan jika menghitung jumlah anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu dalam profil anak belum bisa memunculkan data anak dalam kandungan meskipun janin dalam kandungan juga disebut sebagai anak. Mengingat anak adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang penting bagi setiap orang dan masa anak adalah masa yang sangat rentan perubahannya, maka usia anak dikelompokan dalam 3 periode penting yaitu masa balita, masa usia sekolah dan masa remaja. Untuk balita kita lihat dari kelompok umur 0-4 tahun, sedangkan untuk anak usia sekolah kita lihat dari 5-17 tahun dan usia remaja kita lihat pada kelompok umur 10-17 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

#### **Grafik 10.1**

Jumlah Anak Umur 0-18 Tahun Di Kabupaten Bangka  
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SUNGAILIAT	14,683	13,773	28,456
2	BELINYU	7,597	7,278	14,875
3	MERAWANG	5,171	4,712	9,883
4	MENDO BARAT	8,82	8,406	17,226
5	PEMALI	5,775	5,369	11,144
6	BAKAM	3,177	3,01	6,187

7	RIAU SILIP	4,628	4,416	9,044
8	PUDING BESAR	3,443	3,244	6,687
	JUMLAH	53,294	50,208	103,502

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

### A. Kondisi Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi kepuasan. Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir , kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu Negara. Saat ini kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya bermasalah.

Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhnya kebutuhan anak , pemenuhan hak-hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk mengurangi permasalahan anak tersebut, karena anak merupakan generasi masa depan yang harus diperhatikan kesejahteraannya agar perkembangannya pun baik. Salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan hak anak adalah tentang efektifitas undang-undang perlindungan anak, karena dalam undang-undang tersebut telah dibahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak agar anak dapat

hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya.

Berkaitan dengan indeks perlindungan anak terdapat 2 indikator sebagai penunjang capaian indeks perlindungan anak (IPA), yaitu indikator indeks perlindungan khusus anak (IPKA) dan indeks pemenuhan hak-hak anak (IPHA). Terkait capaian kedua indeks tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**i. Indeks Pembangunan Anak (IPA)**

Indeks Pembangunan Anak (IPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan anak-anak berdasarkan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak Kabupaten Bangka Tahun 2023 67,10 Indeks.

berdasarkan nilai IPA Kabupaten Bangka pada tahun 2023 adalah 67,10, berarti tingkat pembangunan anak di daerah tersebut berada pada kategori sedang, karena skala IPA biasanya berkisar dari 0 hingga 100, dengan semakin tinggi nilai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

**ii. Indeks Pembangunan Keluarga (IPKA)**

Namun, jika Anda merujuk pada istilah IPA dalam konteks lain (misalnya, Indeks Pembangunan lainnya atau sektor tertentu), mohon berikan konteks tambahan agar saya bisa memberikan jawaban yang lebih tepat.Indeks Pembangunan Keluarga (IPKA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas

pembangunan keluarga di suatu wilayah. IPKA terdiri dari tiga dimensi utama:

- a. Ketentraman: Mencakup aspek spiritual dan sosial, seperti kehidupan beragama, keharmonisan keluarga, dan interaksi sosial.
- b. Kemandirian: Meliputi aspek pendidikan dan ekonomi, seperti tingkat pendidikan anggota keluarga dan kemandirian ekonomi.
- c. Kebahagiaan: Menilai tingkat kepuasan dan kebahagiaan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri yang diukur dan dinilai untuk menghasilkan nilai IPKA keseluruhan.

Berdasarkan data yang tersedia, Kabupaten Bangka memiliki nilai IPKA sebesar 84,39 Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Bangka berada pada kategori "Baik". Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan aspek-aspek tertentu yang mungkin memiliki nilai lebih rendah dibandingkan yang lain.

Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Bangka. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan keluarga dapat terus ditingkatkan, sehingga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik di wilayah tersebut.

### **iii. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi di suatu wilayah. IPHA terdiri dari empat dimensi utama:

1. Hak Sipil dan Kebebasan.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Setiap dimensi memiliki nilai indeks tersendiri, dan nilai IPHA keseluruhan merupakan rata-rata dari keempat dimensi tersebut.

Berdasarkan data tahun 2023, Kabupaten Bangka memiliki nilai IPHA sebesar 62,91. Nilai ini diperoleh dari nilai masing-masing dimensi sebagai berikut:

1. Hak Sipil dan Kebebasan: 51,130.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: 81,260.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: 81,460.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya: 34,160

Nilai IPHA sebesar 62,91 menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Kabupaten Bangka berada pada tingkat sedang. Dimensi "Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya" memiliki nilai terendah, yaitu 34,160, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam aspek tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan anak di

wilayah ini.Kemudian untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak anak di Indonesia , maka digunakan satu ukuran yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Capaian IPHA Bangka Belitung.

## **B. Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Anak**

Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 5 yaitu “ setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut Akte Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya.

Untuk mengetahui data kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Grafik 10.2

### Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akte Kelahiran Di Kabupaten Bangka

Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	SUNGAILIAT	14,48	13,597	28,077	98.67
2	BELINYU	7,438	7,154	14,592	98.10.00
3	MERAWANG	5,071	4,615	9,686	98.01.00
4	MENDO BARAT	8,611	8,215	16,826	97.68
5	PEMALI	5,71	5,313	11,023	98.91
6	BAKAM	3,119	2,959	6,078	98.24.00
7	RIAU SILIP	4,547	4,332	8,879	98.18.00
8	PUDING BESAR	3,374	3,177	6,551	97.97
<b>JUMLAH</b>		<b>52,35</b>	<b>49,362</b>	<b>101,712</b>	<b>98.27.00</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 10.5 dapat dilihat bahwa penduduk usia 0-18 tahun anak yang telah memiliki akte kelahiran di Kabupaten Bangka sekitar 84.564 jiwa atau 92,78 % dari anak usia 0-18 tahun. Dilihat dari keseluruhan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Bangka yang sudah mencapai angka 92,78% yang berarti kepemilikan akte kelahiran sudah cukup bagus.

### C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Kartu identitas anak (KIA) ini sama dengan fungsi KTP. Ini adalah kartu identitas yang dikhususkan untuk anak berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah.

Kartu identitas anak (KIA) umumnya terbagi menjadi 2 yaitu :

- i. Kartu identitas anak (KIA) untuk anak yang berusia 0-5 Tahun.
- ii. Kartu identitas anak (KIA) untuk anak yang berusia 5-17 Tahun kurang satu hari.

Kartu identitas ini tentu tak berlaku selamanya, ketika sudah berumur 17 Tahun mereka harus menggantinya dengan KTP. Identitas kependudukan sangat penting sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak kontitisional warga Negara.

Untuk mengetahui data kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 10.3**

Jumlah Anak Yang Memiliki Kart Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Bangka

Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KIA			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	SUNGAILIAT	10,623	10,208	20,831	77.67
2	BELINYU	4,853	4,779	9,632	68.60
3	MERAWANG	3,027	2,883	5,91	63.09.00
4	MENDO BARAT	5,135	4,955	10,09	61.68
5	PEMALI	4,18	3,893	8,073	76.56.00
6	BAKAM	1,994	1,974	3,968	67.56.00
7	RIAU SILIP	3,24	3,15	6,39	74.58.00
8	PUDING BESAR	2,01	1,831	3,841	60.88
JUMLAH		35,062	33,673	68,735	70.22.00

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas Bila dilihat Kecamatan Sungailiat terbanyak dengan jumlah 77,67% dan terendah Kecamatan Puding Besar sebanyak 60,88%..

## **D. Kesehatan Anak**

### **1. Imunisasi**

Imunisasi merupakan salah satu upaya perlindungan kesehatan yang paling efektif untuk anak-anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti: TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru.

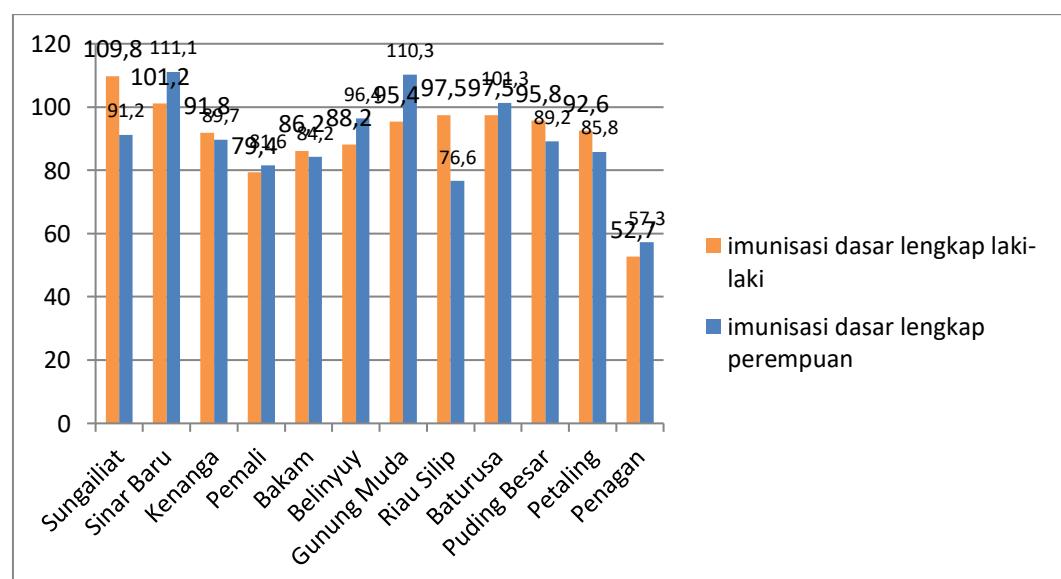
Vaksin dan penggunaan vaksin dapat memengaruhi perkembangan anatomi dan fisiologis progresif normal anak-anak dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan normal adalah proses kompleks yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait dan sangat dipengaruhi oleh Gizi. Anak-anak dengan penyakit menular memiliki kemampuan terbatas untuk mempertahankan gizi dan oleh karena itu berisiko lebih besar mengalami malnutrisi dan keterlambatan perkembangan terkait gizi.

Program imunisasi dasar lengkap menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, yang terdiri dari Bacillus Calmette Guerin (BCG), diphtheria pertussis Tetanus-Hepatitis B- haemophilus influenzae tipe B

(DPT-HB-HiB), hepatitis B pada bayi baru lahir, polio dan HPV. Tinggi rendahnya cakupan imunisasi dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, sikap petugas, lokasi imunisasi, kehadiran petugas, usia ibu, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendapatan keluarga, kepercayaan terhadap dampak buruk pemberian imunisasi, status pekerjaan ibu, tradisi keluarga, dan dukungan keluarga.

Pada tabel 10.7 di sajikan data mengenai cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2023.

**Grafik 10.1**  
Jumlah Bayi/Balita Menurut Pemberian Imunisasi Di  
Kabupaten Bangka Tahun 2024



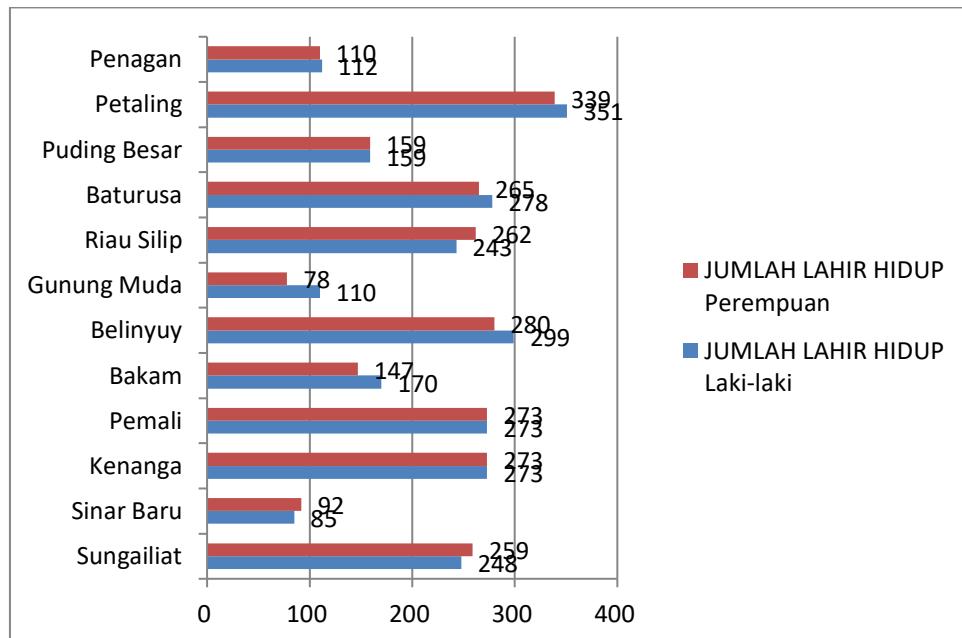
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2024

Pada grafik 10.1 terlihat bahwa jumlah bayi/balita yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Bangka adalah bayi/balita terbanyak yang mendapat imunisasi di Kabupaten Bangka ada di Puskesmas Gunung Muda yakni 110,3% bayi/balita laki-laki dan 97,5% bayi/balita perempuan dan paling sedikit ada di Puskesmas Penagan yakni sebanyak 52,7% bayi/balita laki-laki dan 57,3% bayi/balita perempuan. Pada grafik diatas terlihat data terpisah dari bayi/balita yang di imunisasi. Pentingnya data gender balita adalah untuk mengetahui status dan kondisi balita laki-laki dan perempuan

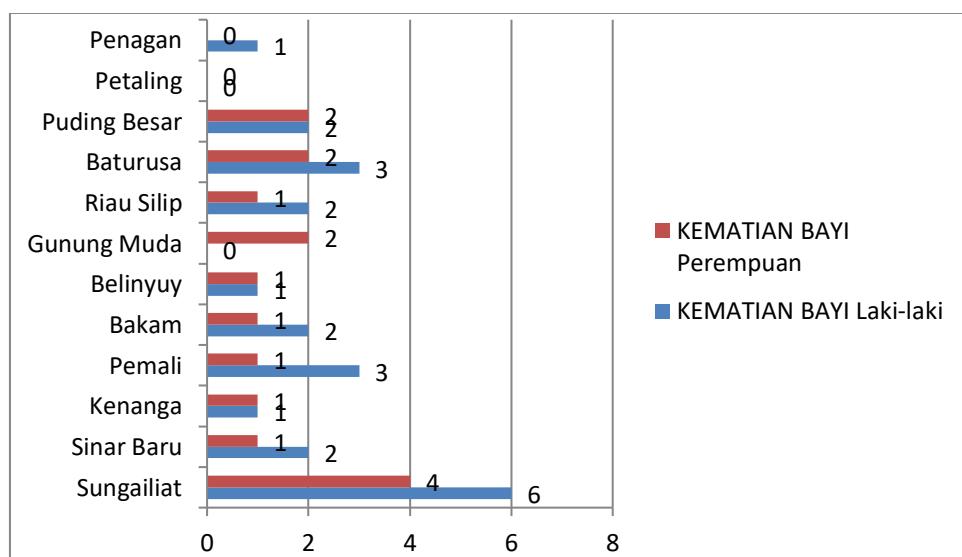
#### **10.4.2.Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi**

Angka kematian bayi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi, terutama saat kehamilan dan melahirkan. Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran kehidupan. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan kematian bayi di indonesia tinggi diantaranya berat badan bayi sudah rendah sejak lahir, asfiksia, dan faktor genetik Data mengenai jumlah kelahiran bayi dan kematian bayi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 10.9 berikut:

**Grafik 10.2**  
**Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2024**



**Grafik 10.3**  
**Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2024**



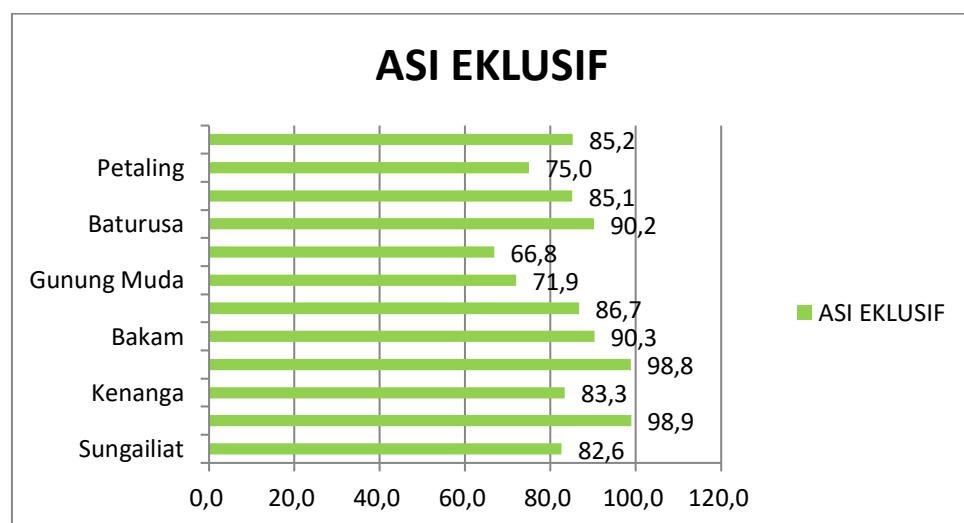
*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2024*

#### 10.4.3.Status Gizi Pada Balita

ASI mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan bayi dalam tumbuh kembangnya. Mulai dari vitamin, protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai mineral penting lainnya. Selain itu, pemberian kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar sesaat setelah melahirkan juga sarat nutrisi dan antibodi untuk melindungi bayi dari infeksi. Selain itu kolostrum juga dapat membantu sistem pencernaan bayi agar berfungsi dengan baik. Hindari memberikan susu formula pada bayi. Pemberian ASI eksklusif pada bayi selama enam bulan pertama memiliki manfaat yang luar biasa. Nutrisi dari susu formula, tetapi tidak dapat menyamai nutrisi dari ASI. Selain untuk kesehatan bayi, pemberian

**Grafik 10.4**

Cakupan Bayi Yang Mendapatkan ASI Ekslusif di Kabupaten Bangka Tahun 2024



*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2024*

Jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 terbanyak Puskesmas Pemali 98,8% dan yang terendah Puskesmas Riau Silip sebanyak 66,8%..

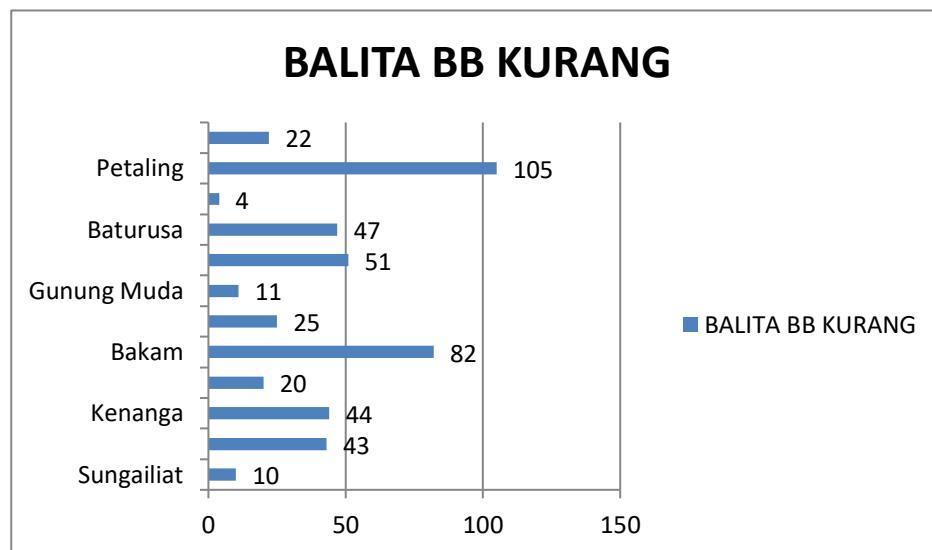
Status gizi merupakan status kesehatan dari suatu individu yang dipengaruhi oleh asupan makanan dan penggunaan zat gizi di dalam tubuh. Status gizi dapat menjadi prediktor suatu outcome penyakit dan juga dapat menjadi salah satu cara pencegahan dini suatu penyakit. Pada masa 2 tahun pertama kehidupan (bayi dibawah dua tahun/bayi) memiliki karakteristik pertumbuhan fisik yang cepat. Kelompok usia bayi dibawah dua tahun (bayi) termasuk kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Usia 0-23 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis.

Dengan lingkungan keluarga yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Di tingkat masyarakat seperti faktor lingkungan yang higenis, asupan makanan, pola asuh terhadap anak, dan pelayanan kesehatan seperti imunisasi sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun, berbagai penyakit gangguan gizi dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu makanan maupun jumlah makanan

yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang masih sering ditemukan diberbagai tempat di Indonesia. Rendahnya status gizi jelas berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena status gizi memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja.

**Tabel 10.5**

Jumlah Balita Gizi kurang, Pendek, dan Kurus Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas diketahui balita yang bergizi kurang sebanyak 464 orang. Dimana Kecamatan Puskesmas Petaling merupakan Kecamatan dengan jumlah balita gizi kurang tertinggi yaitu sebesar 105 orang dan diikuti oleh Puskesmas Bakam sebesar 82 orang. Penanggulangan kasus balita gizi kurang, pendek dan kurus di Kabupaten Bangka dilakukan dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan

berupa pemberian Susu, Biskuit MP-ASI dan Bubur Susu. Dengan adanya pemberian makanan tambahan (PMT) ini dapat membantu menaikkan berat badan balita.

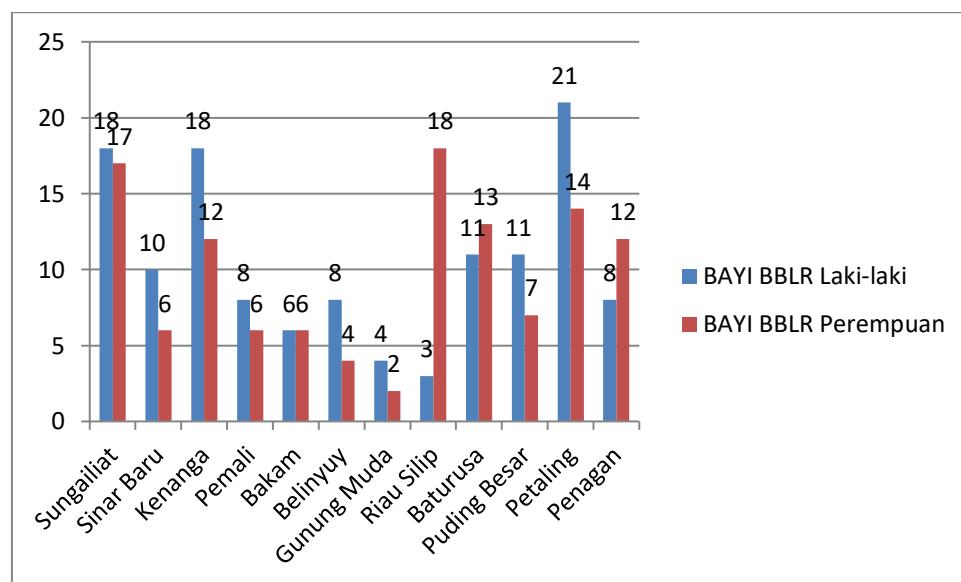
#### **10.4.4.Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)**

Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah berat badan lahir yang kurang dari 2500 gram atau 2,5 kg. Kondisi ini kerap dialami oleh bayi kembar atau bayi lahir secara premature (sebelum usia kelahiran 37 minggu). Kondisi ini membuat kepala bayi terlihat lebih besar dan tubuhnya tampak kurus. Bayi dengan berat badan lahir rendah tetap bias tumbuh sehat. Namun, tak menutup kemungkinan juga mengalami beberapa masalah kesehatan, seperti sulit menaikkan berat badan, sulit menyusu, dan rentan terkena infeksi.

Berat badan lahir rendah (BBLR) biasanya terjadi pada bayi yang lahir secara prematur atau mengalami gangguan perkembangan dalam kandungan. Bayi dengan berat badan lahir rendah lebih rentan terkena infeksi atau penyakit tertentu. Bahkan, dalam jangka panjang, Berat badan lahir rendah (BBLR) berpotensi menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik anak atau kesulitan dalam belajar.

Grafik 10.6

Jumlah Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR)  
di Kabupaten Bangka Tahun 2024



Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) tertinggi ada di Puskesmas Petaling yaitu 21 bayi laki-laki dan 14 bayi perempuan dan paling sedikit berada pada Kecamatan Belinyu (Puskesmas Gunung Muda) yaitu 4 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Hal ini menggambarkan kualitas hidup di dua Kecamatan yang berbeda.

# BAB XI



**DP2KBP3A**  
Kabupaten Bangka

## **BAB XI**

### **GAMBARAN KASUS DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya menekan angka kekerasan melalui sosialisasi dan pelatihan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan, dengan upaya bersama, kasus kekerasan dapat terus berkurang dan hak-hak perempuan serta anak terlindungi dengan baik.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bangka berhasil menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa hingga akhir September 2023, tercatat 16 kasus kekerasan dengan dua korban perempuan dan 14 korban anak-anak. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 22 kasus dengan lima korban perempuan dan 17 korban anak.

Keberhasilan penurunan kasus ini dikaitkan dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Boy Yandra, menekankan pentingnya kerjasama untuk melindungi korban, memberikan hak-hak mereka, serta memastikan penegakan hukum bagi pelaku.

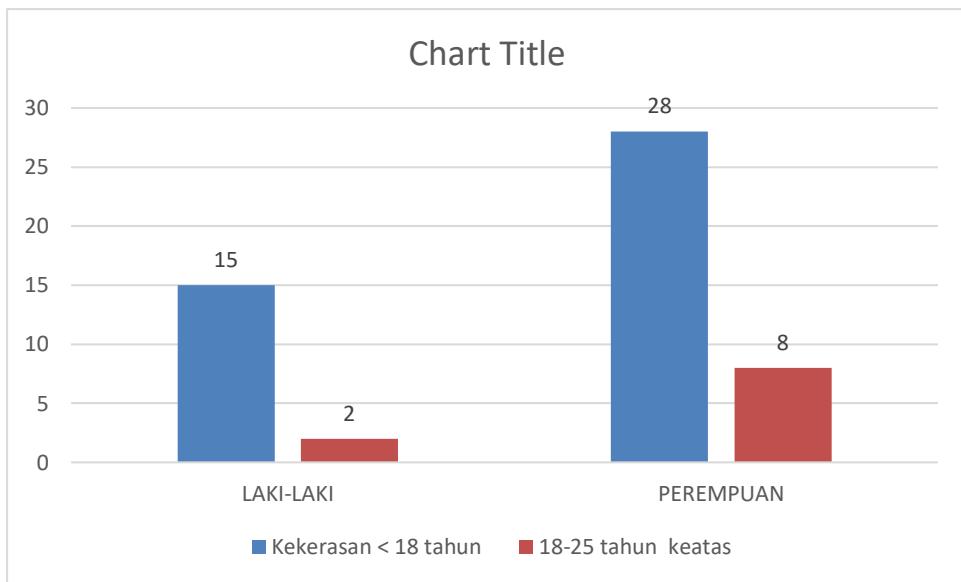
Meskipun demikian, kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi perhatian serius. Kasus-kasus tersebut seringkali melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kewaspadaan dari semua pihak untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Secara umum jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan usia diatas 18 tahun dan anak yang terlaporkan selama tahun

2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Grafik 11.1**

Jumlah Kasus Kekerasan Di Kabupaten Bangka berdasarkan Usia dan jenis kelamin Tahun 2024



Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah terbanyak korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada kelompok umur  $\leq 18$  tahun ke bawah terdapat 43 korban dengan berbagai jenis kasus. Pada Kelompok umur 18 tahun keatas atau usia dewasa sebanyak 10 korban. Hal ini dikarenakan pada fase tersebut perempuan umumnya sudah berumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang paling banyak mereka alami.

## **A. Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang di Alami Korban**

Berdasarkan data simphoni PPA jenis kekerasan dikelompokan atas 6 (enam) jenis yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksplorasi, trafficking, dan kekerasan lainnya. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Seseorang yang menderita kekerasan fisik harus mendapatkan pengobatan secara medis oleh dokter.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada diri seseorang. Seseorang yang mengalami kekerasan psikis biasanya hanya karena goncangan jiwa yang dialami akibat kekerasan yang menimpanya apakah akibat dari kekerasan fisik atau seksual.

Kekerasan seksual adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengerikan.

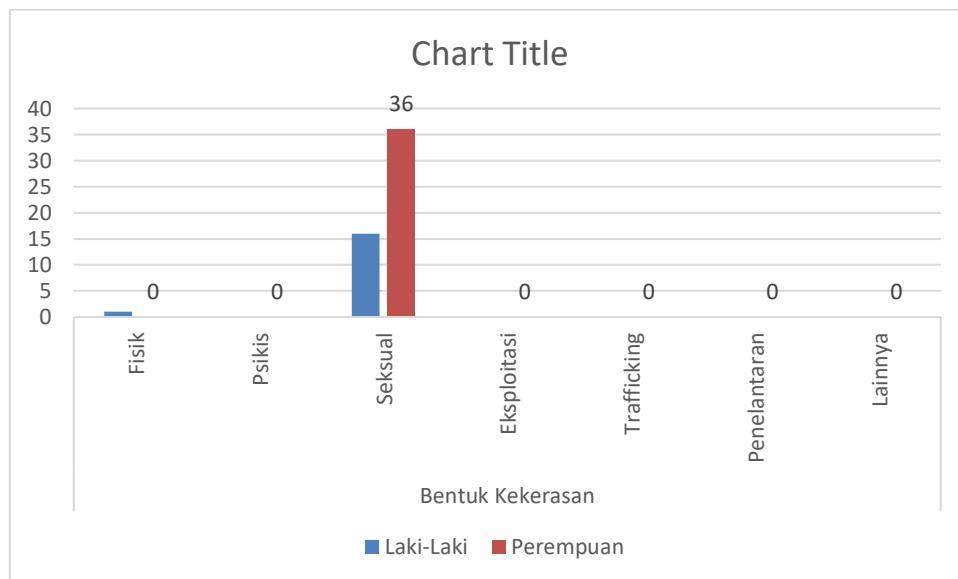
Trafficking atau perdagangan orang menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.

Eksloitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang mengandung unsur pemaksaan. Eksloitasi tidak hanya terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil.

Kekerasan lainnya yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori kekerasan diatas, misalnya penggeroyokan dll. Tabel dibawah ini menyajikan data kekerasan terhadap anak berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban.

**Grafik 11.2**  
**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan Di Kabupaten Bangka Tahun 2024**



*Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2024*

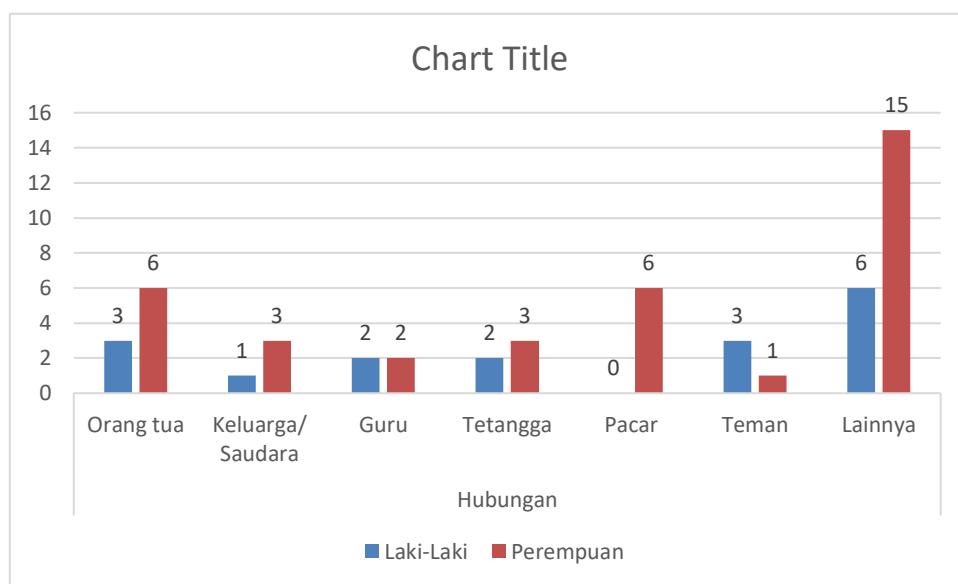
Berdasarkan data diatas jumlah korban kekerasan seksual yang dilaporkan adalah 43 korban dan korban yang mengalami bentuk kekerasan fisik sebanyak 1 orang.

**B. Gambaran Kondisi Kekerasan Berdasarkan Hubungan/Relasi Korban Dengan Pelaku**

Menganalisis kasus kekerasan berdasarkan hubungan/relasi pelaku dengan korban sangatlah penting karena terkadang korban/keluarga korban tidak menyadari bahwa pelaku memiliki niat buruk terhadap anggota keluarganya. Berdasarkan hubungan/ relasi dibedakan menjadi 7 (tujuh) yaitu: hubungan suami dan istri, hubungan pacar/teman, hubungan orang tua, hubungan keluarga/saudara, hubungan guru, tetangga dan lainnya.

Berikut ini disajikan jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan berdasarkan hubungan korban dengan pelaku.

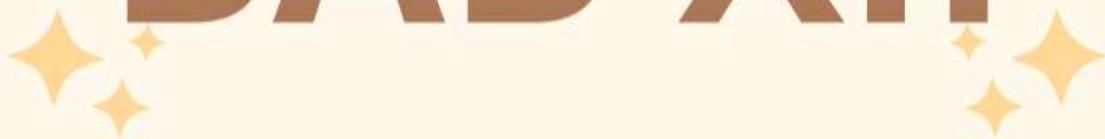
**Grafik 11.4**  
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut  
Hubungan/Relasi Korban Dengan Pelaku Di Kabupaten  
Bangka Tahun 2024



Sumber : UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Bangka Tahun 2024

Berdasarkan data diatas jumlah korban kekerasan berdasarkan hubungan pelaku dengan korban adalah banyak terjadi /dilakukan oleh hubungan lainnya, maksud dari hubungan dilakukan oleh lainnya sebanyak 15 orang perempuan dan 6 orang laki-laki.

# BAB XII



## **BAB XII**

### **KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, melindungi perempuan dan anak, serta memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak perempuan dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan. Tujuan utama DRPPA adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender, menghapus kekerasan berbasis gender, dan melindungi hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan budaya bagi perempuan.

Pada tahun 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bangka telah menetapkan dua desa sebagai model DRPPA, yaitu Desa Penyamun di Kecamatan Pemali dan Desa Air Anyir di Kecamatan Merawang. Diharapkan, jumlah desa model DRPPA akan terus bertambah di delapan kecamatan lainnya di Kabupaten Bangka.

Selain itu, upaya ini juga berkontribusi pada penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2024, IKG provinsi tercatat sebesar 0,401, turun 0,007 poin dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Melalui implementasi DRPPA dan penurunan IKG, Kabupaten Bangka menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan anak, serta mewujudkan kesetaraan gender di wilayahnya.

### A. Anak Terlantar

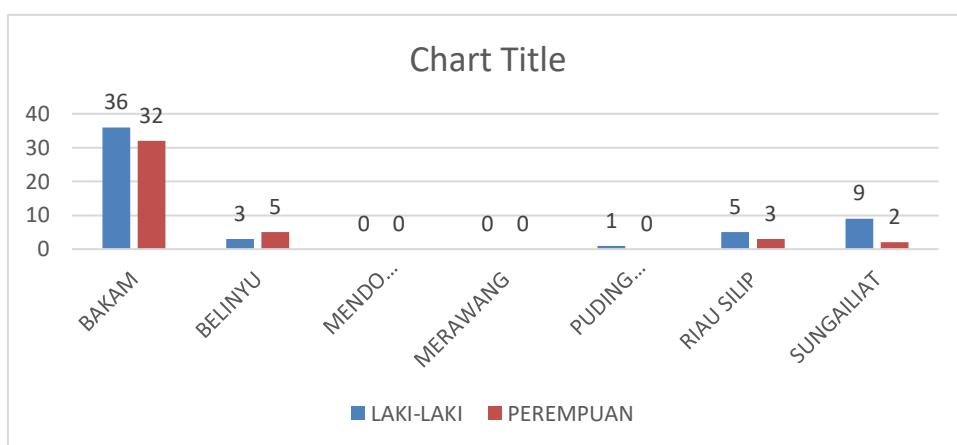
Di Kabupaten Bangka, penanganan anak terlantar menjadi perhatian utama pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD).

Untuk standar layanan anak terlantar, Panti Sosial Bina Serumpun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan persyaratan teknis bagi calon penerima layanan, antara lain berusia 8 hingga 18 tahun dan berasal dari keluarga fakir miskin atau yatim piatu.

Data dari Sistem Data Informasi (SDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di wilayah ini tercatat nol. Secara keseluruhan, pemerintah daerah di Kabupaten Bangka dan sekitarnya terus berupaya memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak terlantar melalui berbagai program dan layanan sosial.

Pada grafik ditunjukkan jumlah anak terlantar di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin, lebih jelasnya di tampilkan pada tabel berikut:

**Grafik 12.1**  
Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024



*Sumber : Dinsos Kab. Bangka Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Bangka tahun 2024 sebanyak 96 orang, anak laki-laki sebanyak 54 orang dan perempuan sebanyak 42 orang.

## B. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi

mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh).

Salah satu perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang cacat atau Anak berkebutuhan Khusus di bidang pendidikan adalah adanya Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak tersebut. Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang tercatat oleh UPTD SLB Sungailiat Kabupaten Bangka secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

i. **Sekolah Luar Biasa**

**Tabel 12.1**

Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bangka Tahun 2024

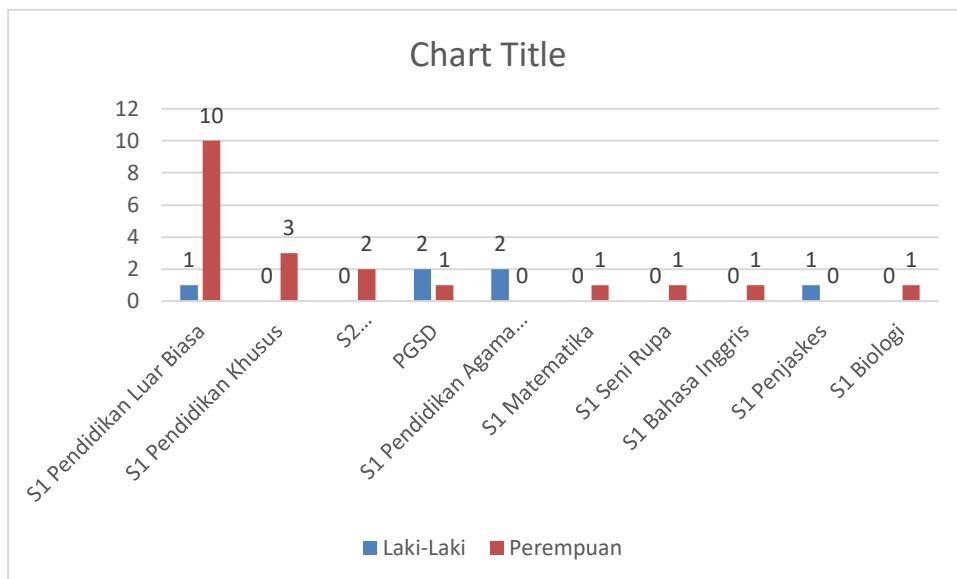
No.	Kecamatan	Jumlah
1.	<b>SLB Negeri Sungailiat</b>	1

*Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bangka ada 1 sekolah.

### Grafik 12.2

Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024

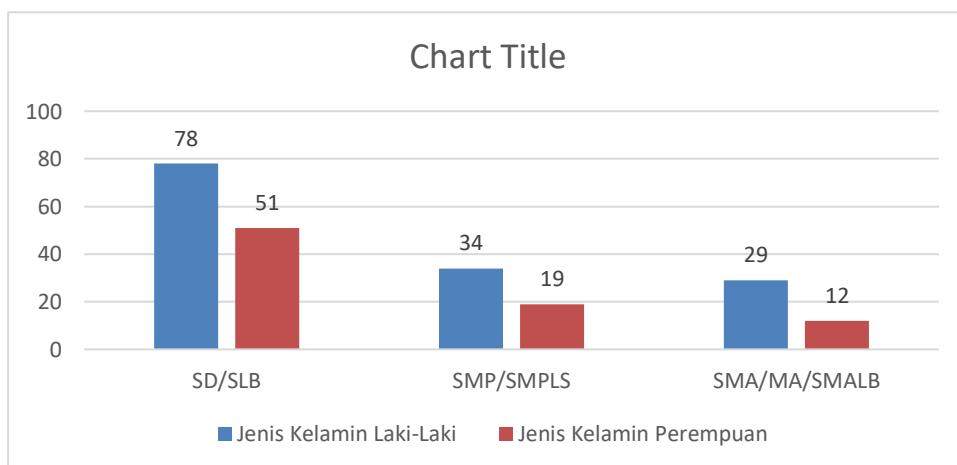


Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2024

Jumlah guru di SLB Negeri ada 26 orang yang terdiri 6 orang guru laki-laki dan 20 orang guru perempuan.

### Grafik 12.3

Jumlah Siswa SLB Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2024



Sumber : UPTD SLB Kab. Bangka Tahun 2024

Dari Grafik di atas tersebut dapat dilihat bahwa jumlah siswa SLB lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari perempuan.

## ii. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif

Di Kabupaten Bangka, lingkungan keluarga memainkan peran krusial dalam tumbuh kembang anak. Orang tua diharapkan memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anak-anak mereka. Hubungan yang hangat dan komunikatif antara orang tua dan anak dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak.

Pemerintah Kabupaten Bangka juga menekankan pentingnya kualitas pengasuhan orang tua dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mereka mendorong keluarga untuk terus belajar dan responsif terhadap setiap tahap perkembangan anak.

Untuk mendukung keluarga dalam pengasuhan anak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) menggelar sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA bertujuan membantu orang tua dan keluarga dalam pembelajaran pengasuhan berbasis hak anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, Kabupaten Bangka telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak Terbaik 2024 Kategori Nindya, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek pengasuhan dan lingkungan keluarga.

Secara keseluruhan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bangka untuk

memastikan lingkungan keluarga yang mendukung dan pengasuhan alternatif yang memadai bagi anak-anak, guna menjamin hak-hak mereka terpenuhi dan tumbuh kembang yang optimal.

# BAB XIII



## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data pilah dan capaian indikator pembangunan responsif gender serta perlindungan anak di Kabupaten Bangka selama tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa poin strategis sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG
  - a. IPG Meningkat: Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka menunjukkan tren positif. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) semakin mengecil.
  - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor publik (legislatif) dan posisi manajerial di birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka telah mencapai ambang batas minimum yang diharapkan, meskipun keterwakilan perempuan di tingkat pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan.
2. Pendidikan dan Kesehatan yang Responsif Gender
  - a. Pendidikan: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara Angka Partisipasi Murni (APM) laki-laki dan perempuan. Program beasiswa dan pendidikan kesetaraan telah berhasil menjangkau kelompok perempuan rentan di pedesaan.
  - b. Kesehatan Reproduksi: Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan berkat optimalisasi peran bidan desa dan akses layanan kesehatan di Puskesmas yang lebih responsif gender. Program pendampingan ibu hamil di wilayah terpencil (seperti di Kecamatan Lepar dan sekitarnya) memberikan dampak signifikan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
    - a. UMKM Perempuan: Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bangka didominasi oleh pelaku usaha perempuan. Integrasi pelatihan digital marketing bagi kelompok usaha perempuan desa telah meningkatkan pendapatan keluarga secara kolektif, yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan ekstrem.
    - b. Akses Kredit: Perluasan akses permodalan tanpa agunan bagi kelompok perempuan pelaku usaha mikro menjadi motor penggerak ekonomi domestik.
  4. Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak
    - a. Kabupaten Layak Anak (KLA): Kabupaten Bangka berhasil mempertahankan dan meningkatkan peringkat KLA. Hal ini didukung oleh ketersediaan fasilitas publik ramah anak, seperti taman bermain dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang tersertifikasi.
    - b. Capaian Akta Kelahiran: Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran telah mencapai target nasional (di atas 98%), berkat integrasi layanan antara DP2KBP3A, Dinas Dukcapil, dan fasilitas kesehatan.
    - c. Penurunan Angka Stunting: Sinergi antara program pemenuhan gizi anak dan edukasi pola asuh responsif gender berhasil menekan prevalensi stunting secara signifikan di desa-desa lokus.
  5. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
    - a. Sistem Pelaporan: Terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan (KDRT dan kekerasan anak). Hal ini bukan menunjukkan kenaikan kriminalitas semata, melainkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor melalui layanan P2TP2A dan aplikasi layanan pengaduan daerah.
    - b. Penanganan Kasus: Rasio penyelesaian kasus kekerasan melalui pendampingan hukum dan psikologis mencapai target

keberhasilan tinggi, dengan fokus pada pemulihan trauma korban.

## 6. Tantangan dan Rekomendasi Strategis.

- a. Data Pilah: Masih diperlukan sinkronisasi data pilah gender hingga ke tingkat desa agar penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) di setiap OPD dan Kecamatan lebih akurat.
- b. Perkawinan Anak: Meskipun menurun, angka perkawinan usia anak masih ditemukan di beberapa titik. Diperlukan advokasi lebih masif melalui sekolah dan lembaga adat/agama untuk memberikan edukasi tentang dampak jangka panjang pernikahan dini.

Profil Gender dan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2025 menunjukkan bahwa strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) telah terinternalisasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini menjadi fondasi kuat bagi Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan temuan data dan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka diajukan beberapa saran sebagai upaya penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bangka ke depan:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka (Bappeda & DP2KBP3A):
  - a. Sinkronisasi Data Pilah: Diharapkan adanya penguatan sistem informasi data gender dan anak yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. Data pilah ini harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD agar intervensi program lebih tepat sasaran.

- b. Peningkatan Kualitas ARG: Perlu dilakukan pendampingan teknis secara berkala kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) agar anggaran responsif gender tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan menyentuh substansi kebutuhan masyarakat.
  - c. Optimalisasi Focal Point: Memberikan apresiasi atau reward kepada OPD/Kecamatan yang memiliki kinerja Focal Point Gender terbaik guna memotivasi penguatan kelembagaan PUG di unit kerja masing-masing.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Desa
- a. Pencegahan Perkawinan Anak: Disarankan agar Pemerintah Kecamatan dan Desa membuat Peraturan Desa (Perdes) atau kesepakatan adat yang membatasi perkawinan usia dini, serta mengaktifkan kembali Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat desa.
  - b. Alokasi Dana Desa: Mendorong penggunaan Dana Desa untuk program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan (pelatihan UMKM) dan penyediaan fasilitas ramah anak (Posyandu terintegrasi dan taman bermain desa).
3. Bagi Sektor Pendidikan dan Kesehatan
- a. Edukasi Seksualitas Sejak Dini: Dinas Pendidikan disarankan untuk mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau muatan lokal guna menekan angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.
  - b. Layanan Kesehatan Ramah Gender: Dinas Kesehatan perlu terus meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada pasien perempuan dan anak yang

berobat, serta memastikan akses layanan kesehatan ibu dan anak merata hingga ke daerah pesisir dan terpencil.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Layanan Perlindungan.
  - a. Penguatan Unit Layanan Pengaduan: Memperluas jangkauan layanan pengaduan melalui media digital yang mudah diakses (WhatsApp/Aplikasi) dan menjamin keamanan serta kerahasiaan identitas pelapor guna meningkatkan keberanian korban KDRT untuk bersuara.
  - b. Rehabilitasi Berkelanjutan: Program pemulihan bagi korban kekerasan tidak boleh berhenti pada pendampingan hukum, tetapi harus berlanjut pada rehabilitasi psikis dan pemberdayaan ekonomi agar korban dapat mandiri secara finansial.
5. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama/Adat
  - a. Perubahan Budaya Patriarki: Tokoh agama dan adat diharapkan aktif melakukan dakwah atau edukasi yang menekankan pada kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, guna meminimalisir potensi kekerasan yang dipicu oleh ketimpangan relasi kuasa.
  - b. Pengawasan Berbasis Komunitas: Masyarakat disarankan untuk lebih proaktif dalam melakukan fungsi kontrol sosial terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu melaporkan jika melihat adanya indikasi kekerasan terhadap anak atau perempuan di lingkungannya.

